

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH  
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN  
DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**PROPOSAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : DIMAS ADJIE PRIAMBUDI**  
**NPM : 1805180002**  
**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Unggul | Cerdas | Terpercaya Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Srata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 10 Oktober 2022, pukul 13.30 Wib sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : DIMAS ADJIE PRIAMBUDI  
NPM : 1805180002  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Konsentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Dra. ROSWITA HAFNI M.Si)

Penguji II

(SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

PANITIA UJIAN



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADI)

Scanned by TapScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DIMAS ADJIE PRIAMBUDI  
NPM : 1805180002  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Konsentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH  
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN DI  
WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERDANG BEDAGAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2022

Pembimbing Skripsi

(Dra.Hj.Lailan Syafina,M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr.PRAWIDYA HARIAN RS, S. E, M. Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(RHJANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Adjie Priambudi  
Npm : 1805180002  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2022  
yang menyatakan

  
Dimas Adjie Priambudi

Scanned by TapScanner

## **ABSTRACT**

The purpose of this study is to conduct a descriptive economic analysis on the development of socio-economic indicators in Serdang Bedagai Regency in 2018-2021 and evaluate government assistance program policies for poor fishing households and analyze the level of community economic welfare. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach by distributing questionnaires to the household economy of fishermen in the coastal area of Serdang Bedagai Regency, Tebing Tinggi Village, Tanjung Beringin District and Sialang Buah Village, Teluk Mengkudu District. The results of this study indicate that the social and economic indicators of the Serdang Bedagai district show a good trend every year. Where, seen from the HDI During the 2016 to 2020 period, the Human Development Index (IPM) of Serdang Bedagai Regency showed great progress, while from the economic sector the increase in Serdang Bedagai's GRDP every year was dominated by the contribution of the agriculture, forestry and fisheries sectors. The government assistance program provides considerable benefits for the community in meeting their basic needs, such as from the aspect of effectiveness, efficiency. However, in the aspect of equity, the community still considers that government assistance programs have not been distributed evenly in accordance with the criteria for recipients of assistance.

Keywords: Serdang Bedagai, Fisherman's Household, Economy

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan indikator sosial ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2018 – 2021 dan melakukan evaluasi kebijakan program bantuan pemerintah bagi rumah tangga nelayan miskin dan menganalisa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada ekonomi rumah tangga nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Serdang Bedagai desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dan desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator sosial dan ekonomi kabupaten serdang bedagai menunjukkan tren yang baik setiap tahunnya. Dimana, dilihat dari IPM Selama periode 2016 hingga 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan kemajuan yang besar sedangkan dari sector perekonomian peningkatan PDRB Serdang Bedagai setiap tahunnya di dominasi oleh kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Program bantuan pemerintah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti dari aspek efektifitas, efisiensi. Akan tetapi, pada aspek pemerataan masyarakat masih menganggap bahwa program bantuan pemerintah belum di distribusikan secara merata sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Kata Kunci: Serdang Bedagai, Rumah Tangga Nelayan, Ekonomi

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan tepat waktu. Skripsi yang berjudul **“EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”** yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan Skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Dengan petunjuk dan bantuan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak maka penyelesaian atas Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar- besarnya kepada Kedua orang tua yang terkasih ayahanda Agus Sutisno dan ibunda Dewi serta kakak abang dan keluarga tercinta yang telah bekerja keras memotivasi baik secara moril maupun material kepada penulis. Dan tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Dra. Lailan Safina M.Si., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmunya yang bermanfaat.
9. Kepada Seluruh staf biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Studi ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh keluarga saya yang turut serta dalam membantu jalannya skripsi.
11. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi Diah, Elva, Icha, Widya

12. Kepada seluruh teman studi ekonomi pembangunan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat member manfaat bagi semua pihak yang membacannya, khususnya Mahasiwa/I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Oktober 2022

Penulis

**DIMAS ADJIE PRIAMBUDI**

**1805180002**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| BAB PENDAHULUAN .....  | 1  |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....  | 1  |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....  | 20 |
| 1.3. Batasan Masalah.....  | 20 |
| 1.4. Rumusan Masalah .....   | 21 |
| 1.5. Tujuan Penelitian .....   | 21 |
| 1.6. Manfaat Penelitian .....  | 21 |
| 1.6.1. Manfaat Akademik.....   | 21 |
| 1.6.2. Non Akademik .....  | 22 |
| BAB II LANDASAN TEORI .....  | 23 |
| 2.1. Uraian Teoritis .....   | 23 |
| 2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....                                     | 23 |
| 2.1.2. Teori Pendapatan Nasional .....                                   | 34 |
| 2.1.3. Pengeluaran Pemerintah.....                                       | 39 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....   | 44 |
| 2.3 Kebijakan / Regulasi .....   | 46 |
| 2.4 Kerangka Penelitian .....  | 48 |
| 2.4.1. Kerangka Konseptual Penelitian .....                              | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN.....   | 50 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian .....   | 50 |
| 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....                                   | 50 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data .....   | 50 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data.....  | 51 |
| 3.5. Populasi .....  | 51 |
| 3.6. Teknik Analisis Data.....   | 52 |
| BAB IV .....   | 53 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN.....  | 53 |
| 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....                                | 53 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai .....                     | 53 |
| 4.2. Kondisi Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai..... | 59 |
| 4.2.1. Inikator Sosial .....   | 59 |

|  |    |
|--|----|
| 4.2.2. Indikator Ekonomi .....   | 62 |
| 4.3. Evaluasi Program Bantuan Pemerintah Bagi Rumah Tangga Nelayan ..... | 63 |
| 4.3.1. Informasi Umum.....   | 63 |
| 4.3.2. Efektivitas Penerima Bantuan .....                                | 68 |
| 4.3.3. Efisiensi .....   | 70 |
| 4.3.4. Pemerataan.....   | 74 |
| 4.3.5. Tanggung Jawab .....  | 76 |
| 4.3.6. Ketepatan .....   | 78 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....  | 79 |
| 5.1. Kesimpulan .....  | 79 |
| 5.2. Saran.....  | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 81 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |   |
|--|---|
| Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011 - 2020 (persen).....                               | 3                                       |
| Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2015-2020 (juta) .....                               | 5                                       |
| Gambar 1.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)<br>Tahun 2020 ..... | 7                                       |
| Gambar 1.4 Alokasi Anggaran Bantuan Masyarakat 2021.....   | 11                                      |
| Gambar 1.5 Alokasi Dana Desa Tahun 2015 - 2021 (Triliun).....                                    | 14                                      |
|  |   |
| Gambar 4.1 peta kabupaten serdang bedagai.....   | 54                                      |
| Gambar 4.2 Perkembangan IPM Kabupaten Serdang Bedagai.....                                       | <b>Error! Bookmark<br/>not defined.</b> |
| Gambar 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....                                    | 64                                      |
| Gambar 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....                              | 65                                      |
| Gambar 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Usia .....  | 65                                      |
| Gambar 4.6 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....                                  | 66                                      |
| Gambar 4.7 Program Bantuan Pemerintah Yang Didapatkan .....                                      | 67                                      |
| Gambar 4.8 Kepuasan Terhadap Program Bantuan .....   | 68                                      |
| Gambar 4.9 Program Bantuan Pemerintah Membantu Mengurangi Beban Keluarga<br>.....                | 69                                      |
| Gambar 4.10 Bantuan Pemerintah Mampu Memenuhi Kebutuhan Pokok<br>Masyarakat .....                | 70                                      |
| Gambar 4.11 Program Bantuan Pemerintah Meringankan Beban Hidup Penerima<br>.....                 | 71                                      |
| Gambar 4.12 Penerima sangat mengandalkan program bantuan tersebut .....                          | 72                                      |

|  |    |
|--|----|
| Gambar 4.13 Proses Pendistribusian Program Bantuan Sangat Baik dan Merata                    | 73 |
| Gambar 4.14 Program Penyaluran Bantuan Pemerintah Sudah Tepat Waktu.....                     | 74 |
| Gambar 4.15 Masyarakat mengetahui informasi mengenai program bantuan<br>Pemerintah.....      | 75 |
| Gambar 4.16 Pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan<br>pemerintah.....       | 76 |
| Gambar 4.17 Masyarakat menggunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan<br>sehari-hari..... | 77 |
| Gambar 4.18 kesesuaian penerima bantuan terhadap kriteria program bantuan<br>pemerintah..... | 78 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....   | 44 |
| Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai .....                                      | 54 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 .....                             | 56 |
| Tabel 4.3 Luas Desa dengan Jumlah Penduduk Tahun 2022.....                                       | 58 |
| Tabel 4.4 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Serdang Bedagai 2015 - 2019 .....       | 60 |
| Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan Serdang Bedagai 2017-2021.....                              | 61 |
| Tabel 4.6 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2017 – 2021 (miliar rupiah) ..... | 62 |

## DAFTAR GRAFIK

|   |    |
|---|----|
| Grafik 2.1 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian.....           | 40 |
| Grafik 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner..... | 42 |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dari berbagai sektor terutama sektor maritim yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia termasuk salah satu Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk giat membangun baik dari sektor ekonomi, pengadaan infrastruktur maupun pembangunan Sumberdaya Manusia. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimana “Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai dengan undang-undang tersebut pemerintah melaksanakan pemerataan pembangunan yang diarahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia yang makmur secara merata pada seluruh masyarakat Indonesia

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan Kesejahteraan Umum. Salah satu proses pencapaian

tersebut adalah melalui pembangunan dimaksud agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yaitu tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut (Todaro, 2011) pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Oleh karena itu, manusia berperan besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah. Ketimpangan

pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Wilayah maju terus meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor non unggulan yang membebani (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018).

Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang berlaku dari tahun ke tahun. Berikut ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 samapai dengan tahun 2020, sebagai berikut;



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

### **Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011 - 2020 (persen)**

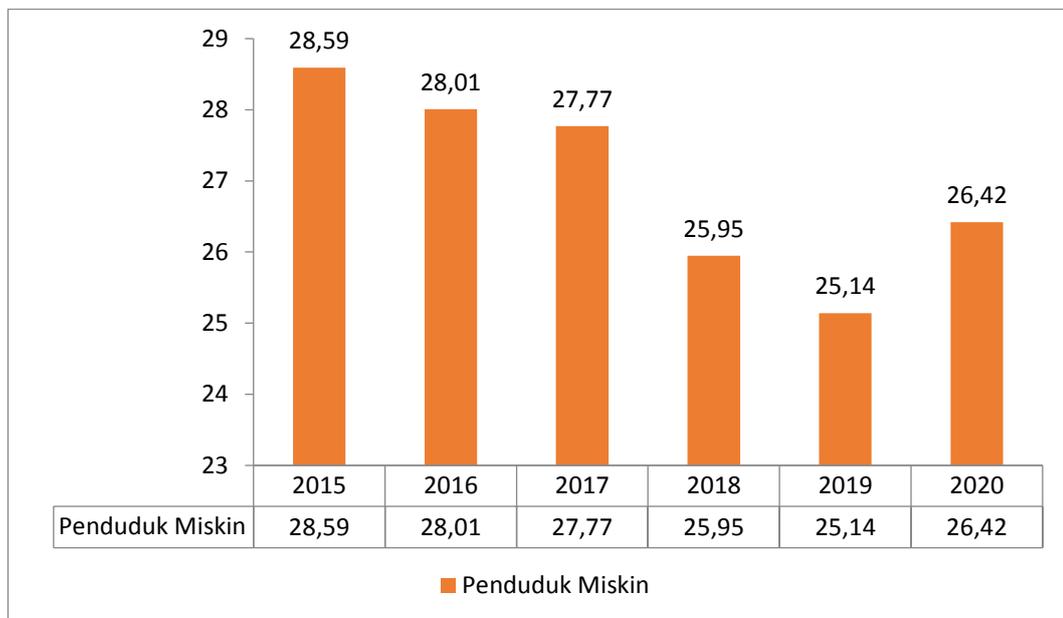
Pada gambar di atas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia pertumbuhannya mengalami peningkatan hanya sedikit. Dimana, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4.88%, pada tahun 2016 mengalami percepatan menjadi 5,03%, pada tahun 2017 naik menjadi 5,07%, dan terus mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menjad 5.17%. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar -2,07%. Pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2020 menunjukkan penurunan akibat dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia. Pandemi Covid-19 melemahkan sektor ekonomi karena tingkat daya beli masyarakat menurun.

Pandemi Covid-19 menghantam sektor perekonomian setiap negara yang terdampak. Salah satu dampak pandemi Covid-19 dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dimana setiap negara mengalami penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya, hal ini dirasakan langsung oleh seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan hebat pada perekonomian Indonesia. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 salah satunya melalui penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Upaya tersebut berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Lesunya kegiatan ekonomi pada berbagai sektor menyebabkan pertumbuhan ekonomi melemah di sepanjang tahun 2020. Kondisi ini tentunya memberikan tantangan bagi Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penurunan tingkat pendapatan dan ketahanan pangan. Hasil survey yang dilakukan oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa terdapat 24 persen dari kepala keluarga yang menjadi sample survey berhenti

bekerja, 64 persen kepala keluarga yang masih bekerja mengalami penurunan pendapatan, dan sekitar 30% rumah tangga melaporkan kekurangan makanan. Isu peningkatan kemiskinan menjadi tantangan penting lainnya bagi Pemerintah di masa pandemi. Suryahadi, et al. (2020) mengestimasi bahwa pandemi Covid-19 dapat meningkatkan jumlah orang miskin baru sebesar 1,3 hingga 8,45 juta. Berdasarkan hasil tersebut, intervensi Pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah peningkatan tingkat kemiskinan. Berikut ini data jumlah penduduk miskin Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2015-2020.



*Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)*

### **Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2015-2020 (juta)**

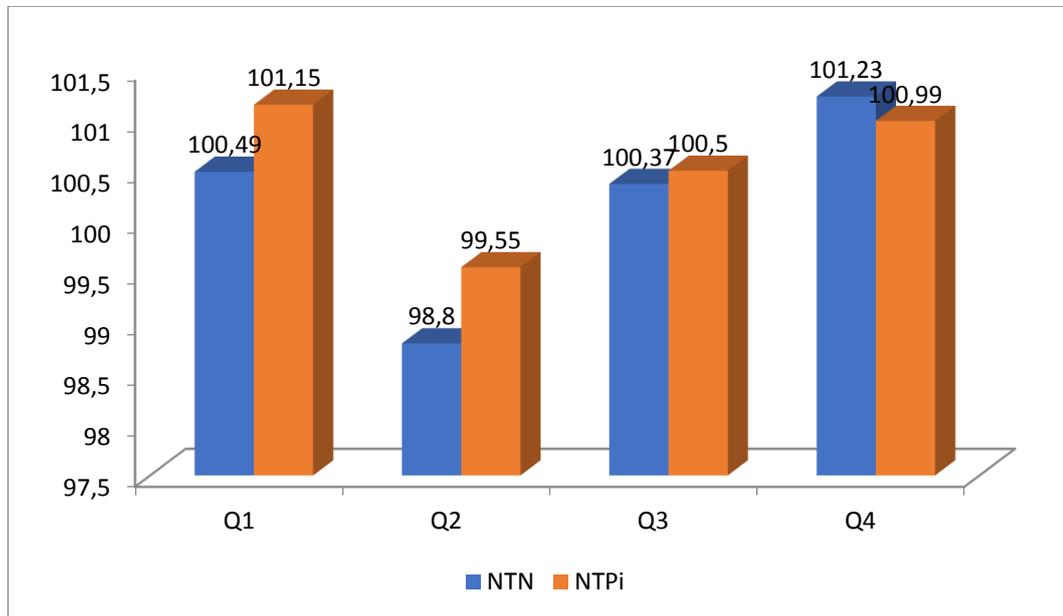
Dari data di atas dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai tahun 2020, laporan Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 25,14 juta. Meningkatnya angka kemiskinan

Indonesia dari tahun 2019 ke-tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 28,59 juta, lalu pada tahun 2016 menjadi 28,01 juta. Pada tahun 2017 jumlahnya menjadi 27,77 juta dan pada tahun 2018 menjadi 25,95 juta. Masih tingginya angka kemiskinan Indonesia disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Peningkatan penduduk miskin di Indonesia terjadi pada semua sector pekerjaan salah satunya adalah sector kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan keberlangsungan sector perikanan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil perikanan menjadi terganggu, akibat dari banyaknya restoran tutup dan kebijakan pembatasan ekspor di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga rantai pasok komoditas perikanan mengalami penurunan permintaan ekspor di Indonesia sebesar 10-20 persen (Widyastuti, 2020).

Selain itu Rumah Tangga Perikanan (RTP) juga ikut terdampak dikarenakan harga ikan yang anjlok maupun pemasaran yang menurun karena ekspor tertutup (Efrizal, 2021). Kebijakan penutupan ekspor ini mempengaruhi penyerapan hasil produksi perikanan para nelayan di Indonesia. Nelayan di Indonesia mengalami kesulitan dalam menjual ikan dan mendapatkan harga yang sesuai. Harga-harga ikan hasil tangkapan menurun, menyebabkan pendapatan nelayan berkurang. Belum lagi, penutupan di beberapa wilayah yang menyebabkan rantai pasok ikan sedikit banyak terganggu (Mardhia. et al, 2020). Pembatasan ekspor dan penurunan tingkat permintaan produk perikanan dan kelautan berdampak pada menurunnya

Nilai Tukar Nelayan (NTN), dimana hal tersebut dapat terlihat dari gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020, diolah

**Gambar 1.3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2020**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2020 rata-rata mencapai 100,22. Sementara itu, nilai tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) rata-rata mencapai 100,55. Berdasarkan data diatas juga menunjukkan bahwa pada triwulan I 2020 rata-rata NTN hanya mencapai 98,80 atau turun sebesar 1,68% disbanding triwulan I 2020. Artinya, pengeluaran keluarga neayan jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Akibatnya daya beli keluarga nelayan mengalami penurunan. Namun demikian pada triwulan 3 – 4 nilai tukar nelayan terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya harga ikan di tingkat nelayan. Hal ini juga terjadi pada keluarga Pembudidaya Ikan. NTPi pada triwulan II 2020 hanya mencapai 99,15 atau turun sebesar 1,58% dibandingkan dengan triwulan I 2020. Artinya pengeluaran keluarga pembudidaya ikan mengalami

penurunan, akibatnya daya beli keluarga pembudidaya ikan mengalami penurunan. Akan tetapi pada triwulan III dan IV 2020 NTPi kembali mengalami peningkatan diatas 100. Artinya, pendapatan keluarga pembudidaya ikan sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan.

Penurunan Nilai Tukar Nelayan(NTP) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) menjadi permasalahan besar bagi perekonomian nelayan Indonesia. Sekitar 80% lebih nelayan Indonesia merupakan nelayan skala kecil yang menggantungkan kehidupan dari tangkapan ikan. Penelitian (Bennett et al., 2020) mengungkapkan, dampak negatif pandemi berimplikasi pada perikanan skala kecil antara lain seperti tangkap ikan setop, risiko kesehatan nelayan, akses pasar terganggu, dan penangkapan ikan ilegal meningkat. Hal ini diperkuat dengan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang telah melakukan survei kepada 2.068 nelayan (nelayan, pelaku usaha perikanan, pemilik kapal, dan lainnya) , dimana hasil survey tersebut menyebutkan bahwa terdapat penurunan penjualan tangkapan mencapai 21 persen, dan penurunan pendapatan nelayan hingga 90 persen.

Pandemi virus corona telah menekan sektor konsumsi yang selama ini selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan nelayan. Untuk merespon isu kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19, Pemerintah hadir melalui berbagai program perlindungan sosial untuk menggerakkan konsumsi masyarakat tersebut yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 9 Mei lalu. Definisi PEN sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 poin (1) tersebut adalah, rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak covid-19

pada perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Sementara Pasal 2 menyatakan tujuannya untuk “melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.” Prinsip pelaksanaan PEN, seperti termaktub dalam Pasal 3, yakni berasas keadilan sosial; untuk kemakmuran rakyat; mendukung pelaku usaha; menerapkan kaidah-kaidah kebijakan penuh kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; tidak menimbulkan moral hazard; dan pembagian biaya dan risiko antar pemangkau kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Program pemulihan ekonomi nasional sebagai bentuk langkah yang diambil oleh pemerintah. Pada penanganan Kesehatan pemerintah menggelontarkan anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Alokasi ini dipergunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 yang meliputi pengadaan fasilitas kesehatan dan karantina di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga kesehatan, dan pengadaan alat tes COVID-19. Stimulus juga diberikan dalam bentuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, termasuk pemberian santunan kematian bagi para tenaga kesehatan yang gugur saat melakukan penanganan COVID-19 dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda) sebesar Rp106,11 triliun, untuk mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat setempat, serta perluasan alternatif pendanaan bagi Pemda dalam bentuk pinjaman PEN daerah, khususnya bagi daerah- daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 yang relatif parah agar mampu

membayai berbagai belanja prioritas di daerahnya. Dukungan sektor UMKM sebesar Rp123,46 triliun dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional karena UMKM berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dukungan pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun untuk menjaga keberlangsungan usaha korporasi di tengah pandemi, khususnya bagi korporasi padat karya melalui pemberian fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberian insentif usaha dengan anggaran sebesar Rp120,61 triliun. Program ini ditujukan untuk membantu upaya dunia usaha dalam meminimalisir terjadinya kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja serta menggerakkan sektor perekonomian, dukungan diberikan dalam bentuk insentif perpajakan. Dan terakhir Perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp203,90 triliun. Program ini difokuskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh bangunan, pekerja pabrik, petani, pedagang kecil, dan lain-lain. Dukungan perlindungan sosial diwujudkan melalui sejumlah program intervensi langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Sembako Jabodetabek, serta intervensi tidak langsung berupa diskon tarif listrik dan Kartu Pra-Kerja. Program perlindungan sosial merupakan salah satu prioritas utama dalam Program PC-PEN untuk mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat, khususnya dari kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak hanya berhenti pada tahun 2020. Pemerintah terus berkomitmen memulihkan perekonomian nasional dengan tetap mengalokasikan dana untuk program bantuan masyarakat melalui

perpanjangan bantuan hingga 2021. Dimana, alokasi perpanjangan bantuan tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Sumber : Kemenkeu ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

### Gambar 1.4 Alokasi Anggaran Bantuan Masyarakat 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa komitmen pemerintah Indonesia dalam mensukseskan program PEN terus berlanjut. Dimana, pemerintah memperpanjang beberapa jenis bantuan hingga 2021. Program bantuan pemerintah yang akan berlanjut antara lain bantuan presiden untuk usaha mikro dan kecil, bantuan subsidi gaji untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, kartu prakerja, bansos tunai, program keluarga harapan (PKH), serta bantuan sembako. Anggaran untuk melanjutkan program PEN pada 2021 senilai Rp356,5 triliun. Anggaran itu termasuk program perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah senilai Rp110,2 triliun. Beberapa program yang tetap dilanjutkan di 2021 salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Anggaran yang dialokasikan untuk program itu adalah sebesar Rp28,71 triliun. Bantuan Kartu Sembako dengan

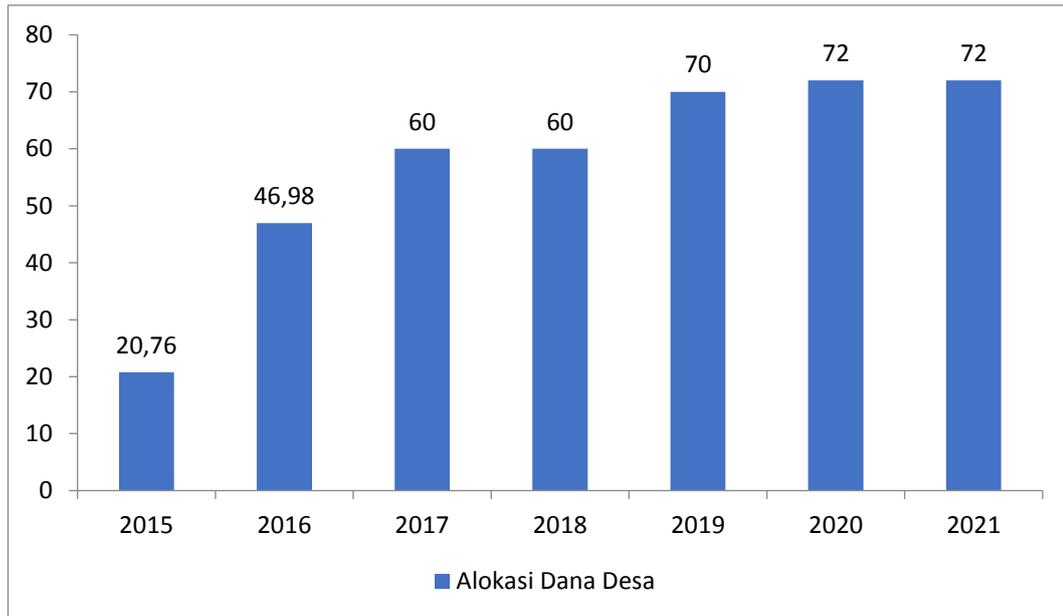
anggaran sebesar Rp45,12 triliun, dengan target penerima sebanyak 18,8 juta keluarga. Program lainnya yang terus dilanjutkan di 2021 adalah Bantuan Sosial Tunai (BST), yang besaran anggarannya adalah Rp12 triliun. Program itu akan menargetkan 10 juta keluarga sebagai penerima. Lagi-lagi program ini diharapkan bisa menjadi solusi pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada sektor perlindungan sosial terdapat didalamnya bantuan langsung tunai dana desa dan padat karya tunai desa yang bersumber dari anggaran dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kab/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pendemi. Dana Desa

merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah mengangarkan Dana Desa sebagai salah satu penanganan pandemi covid-19, berikut anggaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2021.



Sumber : Kementerian Keuangan RI ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

**Gambar 1.5 Alokasi Dana Desa Tahun 2015 - 2021 (Triliun)**

Dilihat dari grafik diatas, tren anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Alokasi dana desa dari APBN sebesar Rp 20,76 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016 alokasi dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 46,98 triliun naik 1 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk dana desa dengan rata-rata perdesa mendapatkan sebesar Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 46,98 triliun. Tahun 2018 anggaran untuk dana desa tidak mengalami peningkatan dan penurunan, sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 70 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 933 juta. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 anggaran dana desa meningkat sebesar Rp 72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 960 juta. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2021 mencapai Rp 401,74 triliun.

Sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian/penggunaan Dana Desa untuk : (1) Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (2) Padat Karya Tunai Desa (PKTD). (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, kemudia Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai ialah keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi syarat yaitu tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Provinsi Sumatera Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah timur dan di sebelah barat juga berbatasan langsung dengan samudera Indonesia, sehingga 6,65% dari seluruh desa/kelurahannya merupakan daerah pantai yang mempunyai potensi besar dibidang perikanan laut (BPS Sumut:2010). Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pantai pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan perikanan laut. Menurut data kementerian Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Utara menempati urutan ketiga dengan jumlah nelayan terbanyak setelah Sulawesi Selatan dan Maluku. Dimana, tahun 2020 jumlah penduduk Sumatera yang berprofesi sebagai nelayan mencapai angka 145.740, jumlah ini menurun sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dimana, pada tahun 2019 sebanyak 177.844 dan pada tahun 2018 mencapai 197.223. Penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh kesejahteraan nelayan sangat rendah sehingga membuat masyarakat beralih profesi atau tidak ingin melanjutkan profesi sebagai nelayan.

Dilain sisi penurunan produksi perikanan juga menjadi salah satu faktor kurangnya minat masyarakat menjadi nelayan di Sumatera Utara. Dimana, jumlah produksi Perikanan Tangkap pada 2019 sebesar 540.421,79 Ton sedangkan Produksi pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 420.419,65 ton untuk Produksi Perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 246.908,36 ton sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 227.235, 27 ton. Disamping itu, menurunnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Sumatera Utara juga menjadi sesuatu yang merugikan nelayan. Dimana, pada tahun 2019 NTN di Sumatera Utara sebesar 101 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi

99,1, melemahnya NTN sangat menyedihkan bagi nelayan kita, artinya nelayan yang bekerja dalam kondisi merugi.

Kemiskinan hampir menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat nelayan, mengingat kehidupan masyarakat nelayan dari hari ke hari sangat tidak menentu, sebab rata-rata mereka hanya menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan dilaut yang hasilnya belum tentu cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terutama masyarakat nelayan yang bekerja sebagai buruh nelayan yang tidak mempunyai alat tangkap ikan dan bekerja secara aktif dalam penangkapan ikan di laut. Pendapatan yang diperoleh tergantung dari hasil tangkapan yang pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara juragan sebagai pemilik alat tangkap itu sendiri dan buruh nelayan sebagai pekerja aktif dalam kegiatan penangkapan ikan.

Kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup masalah keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan dan hubungan kerja Patron-Klien dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan Klien. Faktor-faktor yang bersifat eksternal mencakup masalah kebijakan pembangunan pertanian yang berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, dan tidak memihak nelayan tradisional, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara (Fahrudin, 2010).

Salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki potensi perikanan adalah kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah

satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang potensial, nilai produksi perikanan tangkap laut wilayah ini pada tahun 2018 tercatat Rp410.001.332.000,- memberikan kontribusi sebesar 4,57% bagi produksi perikanan tangkap laut Provinsi Sumatera Utara (BPS, 2019). Wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang 55 km yang meliputi 6 kecamatan yaitu; Kecamatan Bandar Khalifah, Tanjung Beringin, Sei Rampah, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Pantai Cermin (BPS, 2020). Berdasarkan data BPS, (2020); BPS, (2018) bahwa produksi hasil perikanan laut (perikanan tangkap) per kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai cenderung fluktuatif.

Produksi perikanan di Kecamatan Teluk Mengkudu mengalami penurunan 3,48% pada tahun 2019 menjadi 5.552 ton dari 5.752 ton tahun 2018. Produksi perikanan di Kecamatan Tanjung Beringin, juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 produksi tercatat 8.912 ton, dan turun 0,28% menjadi 8.887 ton pada tahun 2019. Namun sebaliknya produksi perikanan di Kecamatan Pantai Cermin mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebesar 4,21% pada tahun 2019 yaitu 5.277 ton dari tahun 2018 dengan produksi 5.064 ton, dengan demikian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Serdang Bedagai pada 2015-2018 sangat fluktuatif. Tahun 2015 produksi perikanan tercatat 25.363 ton dan meningkat 0,80% pada tahun 2016 menjadi 25.567 ton, dan mengalami penurunan 9,56% menjadi 23.122 ton tahun 2017. Tahun 2019 produksi perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai meningkat 0,02% menjadi 23.872 ton (BPS, 2020); (BPS, 2018).

Fluktuasi produksi perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai, disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Keterbatasan

sumber daya dan prasarana yang dimiliki nelayan khususnya modal turut mempengaruhi produktivitas nelayan tersebut, seperti halnya; di Kecamatan Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu yang menyebabkan penurunan produksi yang signifikan seperti pada tahun 2018-2019 (BPS, 2020). Kondisi ini menggambarkan penurunan pendapatan dan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai. Karakteristik nelayan identik dengan aset yang terbatas, struktur permodalan lemah, posisi tawar dalam mengakses sumber daya ekonomi cukup lemah, demikian juga dengan akses pasar dan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan (Cahaya, 2015), bahkan nelayan memiliki kelemahan dari sisi teknologi penangkapan ikan, ditambah buruknya kualitas lingkungan akibat berbagai pencemaran (Parenrengi et al., 2020).

Dari observasi yang telah peneliti lakukan, kondisi masyarakat pesisir khususnya rumah tangga nelayan di kawasan tersebut masih hidup dibawah garis kemiskinan. Beberapa faktor penyebab kemiskinan diakibatkan oleh beberapa hal seperti fluktuasi musim tangkap yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak maksimal, dan masih terbatasnya akses teknologi nelayan untuk mendukung aktivitas mereka dalam menangkap ikan sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu seperti Sudarso (2004) menjelaskan banyak penelitian telah membuktikan bahwa tekanan kemiskinan struktural yang melanda kehidupan nelayan tradisional, sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor kompleks. Faktorfaktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, serta akses jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai

produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan atau revolusi biru yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan. Proses demikian masih berlangsung hingga sekarang dan dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan nelayan dan sulitnya memperoleh hasil tangkapan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di kecamatan Berandan Barat dengan judul penelitian **“Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat di temukan beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang semakin tinggi mengakibatkan ketimpangan pembangunan setiap daerah.
2. Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sehingga sebesar -2,07%
3. Meningkatnya Kemiskinan sebanyak 5,09% dari tahun 2019 ke 2020.
4. Masyarakat pesisir Kabupaten Serdang Bedagai masih hidup dibawah garis kemiskinan
5. Terbatasnya akses teknologi nelayan menyebabkan hasil tangkap nelayan tidak maksimal
6. Potensi wilayah pesisir belum dimanfaatkan secara optimal

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Serdang Bedagai desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dan desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan indikator Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat rumah tangga nelayan di pesisir Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan indikator sosial ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2018 - 2021.
2. Melakukan evaluasi kebijakan program bantuan pemerintah bagi rumah tangga nelayan miskin dan menganalisa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1. Manfaat Akademik**

1. Sebagai bahan studi atau tambahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topic yang sama.
2. Sebagai bahan tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan terkait.

3. Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis dan sistematis
4. Sebagai tambahan pembelajaran mahasiswa mengenai pembahasan terkait.

#### **1.6.2. Non Akademik**

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah setempat dalam menentukan kebijakan
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah pengetahuan bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi**

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income- GNI*) per kapita “riil” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini semakin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan absolut, distribusi

pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran. Singkatnya, dalam dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisi ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro dan Smith, 2011:17).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok- kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2011:18-19).

Terdapat tiga komponen dasar ataupun nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti pembangunan tersebut ialah (Todaro dan Smith, 2011:25-26):

- a Kecukupan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupannya ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau

persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi “keterbelakangan absolut”.

- b Harga diri (*self-esteem*) : Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik adalah harga diri, yaitu suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Denis Goulet, “Pembangunan telah dilegitimasi sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting, bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri.”
- c Kebebasan (*freedom*) : kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dan terakhir yang perlu tercakup dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan manusia. Pengertian kebebasan di sini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga

dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

## A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

### 1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

#### a. Hukum Alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

#### b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

#### c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

## 2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa:

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
2. “*law of diminishing return*” berlaku bagi tanah;
3. Persediaan tanah adalah tetap;
4. Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
6. Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*);
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap;
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
10. Terdapat persaingan yang sempurna;
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010)

#### B. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori Pattern of Development memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*). (Todaro & Smith, 2011)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal

dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas disektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011).

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011).

### C. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar

terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

### 1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal product) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

### 2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk

marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

#### D. Teori Pembangunan Ekonomi Rei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang- bidang nonpertanian memang ada, tetapi begitu banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap output adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Rei dan Ranis membuat asumsi berikut (Todaro & Smith, 2011). :

1. Ada ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif;
2. Output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja;
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi);
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap;
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (return to scale) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel;
6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol; Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (output) pertanian.
7. Output sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja;
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen;
9. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian;
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk produk pertanian;

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, para penganggur tersamar yang tidak menambah output pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada tahap kedua, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali tahap ketiga, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan

awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial.

### **2.1.2. Teori Pendapatan Nasional**

Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2010:36). Secara fiknitif, pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu, prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross domestic Product* (GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP).

Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah. Pendapatan nasional yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro, merupakan variabel penting guna mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro. Perubahan di dalam variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap variabel yang lain. Pendapatan Nasional di anggap pilar utama penyangga Politik Ekonomi artinya kearah Pendapatan Nasional itulah hampir semua kebijakan di bidang perekonomian difokuskan.

Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang

diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai (Sukirno,2008).

Metode perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Selain untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan pendapatan nasional juga bisa dijadikan alat evaluasi. Di mana, Negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusianya dan mengukur produktivitas negaranya.

Terdapat 3 (tiga) metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (*Production Approach*), pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*), dan pendekatan pendapatan (*Income Approach*).

**a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)**

Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif. Cara ini menghasilkan *Gross National Product* atau GNP. Perhitungan dalam pendapatan nasional hanyalah nilai tambah (*value added*) dari masing-masing lapangan usaha/sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan pada berbagai tahapan proses produksi. Dimana nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi dan nilai biaya yang dikeluarkan, yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

Pendapatan produksi terbagi menjadi 9 sektor utama, yaitu :

- 1) Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
- 2) Sektor pertambangan
- 3) Sektor industri
- 4) Sektor listrik, gas dan air bersih
- 5) Sektor konstruksi
- 6) Sektor perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Sektor pengangkutan dan komunikasi
- 8) Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9) Sektor jasa lainnya.

Rumus pendapatan nasional untuk pendekatan produksi :

$$Y = \sum P_n \cdot Q_n \dots\dots\dots (2-1)$$

Dimana :

Y = pendapatan nasional

P<sub>n</sub> = harga jual produk jadi

Q<sub>n</sub> = jumlah produk diproduksi

**b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun. Yang termasuk faktor produksi

adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian/kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda, misalnya:

- 1) Tenaga kerja dapat memperoleh gaji/upah
- 2) Pemilik modal akan mendapat bunga
- 3) Pemilik tanah dapat memperoleh sewa
- 4) Keahlian atau skill dapat memperoleh laba

Rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:

$$Y = r + w + i + p \dots\dots\dots (2-2)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional

r = Upah/gaji

w = Sewa

i = Bunga

p = Laba Usaha

**c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)**

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran sektor-sektor yang terlibat dalam perekonomian atau menjumlahkan pengeluaran dari masyarakat kedalam barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Masing-masing sektor perekonomian yaitu :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)
- 2) Pengeluaran Investasi (I)

3) Pengeluaran konsumsi Pemerintah (G)

4) Ekspor netto (X-M)

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (2-3)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan nasional

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan nasional. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara.

Adapun komponen pendapatan nasional yaitu :

- 1) *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu Negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di Wilayah Negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang

belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor.

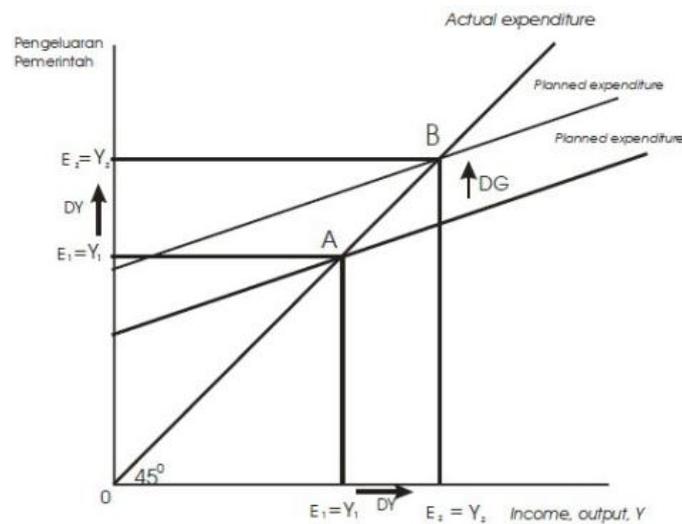
- 2) *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai seluruh produk yang diproduksi seluruh masyarakat nasional di dalam dan di luar negeri pada periode tertentu.
- 3) *Net National Product* (NNP) atau Produk Nasional Netto (PNN) adalah nilai GNP yang berubah karena penyusutan harga barang-barang modal.
- 4) *National Income* (NI) atau Pendapatan Nasional (PN) adalah pendapatan agregat yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi. Pendapatan nasional mengukur pendapatan agregat yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebelum pajak (*direct taxes*) dan pembayaran transfer (*transfer payment*).
- 5) *Personal Income* (PI) atau Pendapatan Perseorangan (PP) adalah nilai NI yang dikurangi jaminan sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah pembayaran pindahan (*transfer payment*). Pembayaran pindahan adalah tunjangan yang diberikan Negara kepada individu untuk mensejahterakan masyarakat dan menambah pendapatan seseorang.
- 6) *Disposable Income* (DI) atau Pendapatan Bebas (PB) adalah jumlah pendapatan yang secara aktual tersedia bagi rumah tangga yang siap untuk dibelanjakan atau digunakan. Pendapatan *Disposable* diperoleh dengan cara Pendapatan Nasional dikurangi Pajak perorangan (*personal taxes*) dan kewajiban-kewajiban bukan pajak (*nontaxes liabilities*).

### **2.1.3. Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa,

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263).

**Grafik 2.1 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian**



Sumber : Mankiw, 2003; 263

Pada grafik 2.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, 37 sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesebroto, 1993; 169):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.

#### **A. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Mangkoesebroto menjelaskan dalam bukunya bahwa model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

#### **B. Hukum Wagner**

Hukum Wagner yang dijelaskan oleh Mangkoesebroto mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke 19, hukum tersebut berbunyi : dalam

suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner ini memiliki kelemahan karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangan dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$P_k PP_1 ( P_k PP_2 (... P_k PP_n$$

$$PPK_1 PPK_2 PPK_n$$

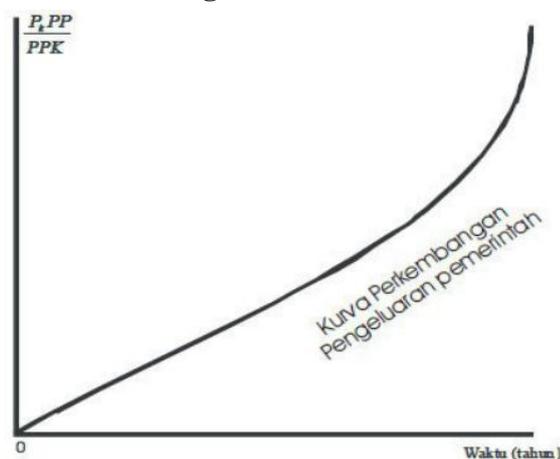
$P_k PP$  : Pengeluaran Pemerintah perkapita

$PPK$  : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

1,2,...n : jangka Waktu (Tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 2.2 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).

**Grafik 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner**



Sumber : Mangkoesobroto, 1993; 172

### **C. Teori Peacock dan Wiseman**

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesobroto : 173). Teori mereka sering disebut sebagai The Displacement Effect, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam Mangkoesobroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman 40 mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesobroto : 173) :

*“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”*

Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama / Tahun                               | Judul  | Metode                        | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|-------------------------------|--|
| 1  | Carly Erfly<br>Fernando Maun<br>(2021)     | Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan | Metode Penelitian Kualitatif  | Akibat adanya Pandemi Covid-19 perekonomian masyarakat menjadi menurun dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu melakukan Refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing yaitu Dana Desa.  |
| 2  | Ainin Azhari dan<br>Dwi Suhartin<br>(2021) | Efektivitas Dana Desa untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19   | Metode Penelitian Kualitatif  | Dalam penyaluran BLT-DD, perangkat desa menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Tetapi penerima BLT-DD belum bisa memanfaatkan dana tersebut dalam pengembangan kesejahteraannya. Dengan itu, pemerintah desa memberikan edukasi dan pelatihan tentang berwirausaha kepada masyarakat agar BLT-DD lebih berdaya dan perekonomian masyarakat desa dapat meningkat   |
| 3  | Ali Akbar<br>Khomaini (2020)               | Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) Terhadap Kesejahteraan Subjektif di Indonesia   | Metode Penelitian Kuantitatif | Dampak program UCT di Indonesia berkolegrasi negative dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan penerimanya. Pemerintah harus lebih meningkatkan ke efektivitas pelaksanaan program, terkait jumlah bantuan tunai yang masih belum dapat mencukupi kebutuhan penerima, lebih memperhatikan lagi sasaran penerimanya, dan memperbaiki komunikasi dan koordinasi terhadap semua lembaga untuk menghilangkan peluang korupsi dan |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  | konflik sosial. Sehingga Program UCT ini dapat membantu kestabilan kesejahteraan penerima yang mengalami guncangan ekonomi  |
| 4 | Safaruddin, Fatmawati, Burhanuddin, Hafiz Elfiansyah (2019) | Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada aspek hubungan organisasi dan antar organisasi terdapat komitmen dari organisasi lintas sector dalam pelaksanaan PKH, dimana Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan berkomitmen menyukseskan program pemerintah di bidang sosial dan bidang pendidikan sebagai perpanjangan tangan dari kementerian masing-masing. Pada aspek perilaku implementor menunjukkan adanya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh implementor level bawah, yakni pendamping agar program PKH dapat berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun di beberapa aspek lainnya, pendamping masih belum mampu mengambil suatu tindakan dalam mengatasi suatu masalah yang ada di lingkungan KMP. Pada aspek perilaku kelompok sasaran menunjukkan respon positif KPM dengan meningkatnya angka partisipasi belajar siswa dengan adanya bantuan PKH pada bidang pendidikan |
| 5 | Ibnu Sazime Arief (2017)                                    | Evaluasi pelaksanaan program raskin di kelurahan maharatu kota pekan baru  | Kualitatif   | Hasil penelitian terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin, terlihat dari waktu penyaluran raskin yang tidak dilaksanakan setiap bulannya, jumlah raskin yang diterima RTM hanya 5-10 kg setiap periode penyaluran tidak tersedianya anggaran dalam penyaluran raskin karena tidak memiliki identitas sebagai warga kelurahan Maharatu dan masih ada nepotisme yang terjadi dalam pendataan RTM sebagai penerima raskin  |
| 6 | Ni Made Dwi Kusumayanti, et al., (2018)                     | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Jembrana                                 |  | Hasil pengujian dalam penelitian menunjukkan: 1) Modal sosial berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan; Faktor Produksi berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan; 2) Modal sosial berpengaruh positif terhadap kesejahteraan nelayan di Kabupaten Jembrana; Faktor Produksi berpengaruh   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | positif terhadap kesejahteraan nelayan di Kabupaten Jembrana; 3) Pendapatan memediasi pengaruh modal sosial dan faktor produksi terhadap kesejahteraan nelayan di Kabupaten Jembrana. |
|--|--|--|--|---|

### 2.3 Kebijakan / Regulasi

Kesejahteraan sosial sangat diperlukan sebagai suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara didalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial tersebut diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kondisi masyarakat yang sejahtera merupakan amanat Tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pembukaan alinea ke IV menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial diwujudkan melalui regulasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara

terencana, terarah dan berkelanjutan, oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, dan akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial, serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, selama ini dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dukungan sumber daya manusia dan peran masyarakat, serta dukungan pendanaan belum optimal. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi akan mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

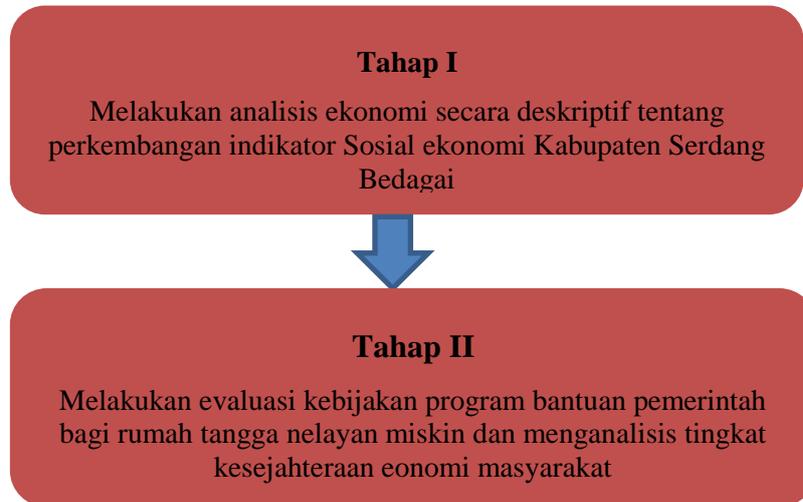
Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial khususnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mencakup Ketentuan Umum, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial, Standar Sarana dan Prasarana, Peran Masyarakat, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Sanksi Administrasi, Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan Pendanaan.

Khusus pengaturan mengenai pendaftaran dan perizinan bagi lembaga kesejahteraan sosial dimaksudkan dalam rangka penataan administratif, pembinaan, dan pengawasan terhadap keberadaan lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, sehingga perlu diatur pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk izin lembaga kesejahteraan

sosial asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih profesional dimasa mendatang. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur juga ketentuan mengenai izin operasional yang berlaku bagi lembaga kesejahteraan sosial asing, dan izin operasional tersebut baru dapat diberikan setelah lembaga tersebut mendapat izin prinsip dari Kementerian Luar Negeri. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini nantinya dimaksudkan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia dapat diwujudkan.

## 2.4 Kerangka Penelitian

### 2.4.1. Kerangka Konseptual Peneli



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dilakukan pada tahap 1 dilakukannya analisis indikator Sosial ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai yang digunakan untuk melihat perkembangan indikator Sosial ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. Pada tahap 2 dilakukannya evaluasi kebijakan

program bantuan pemerintah bagi rumah tangga nelayan miskin dan menganalisis tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, tahap ini digunakan untuk mengevaluasi kebijakan program bantuan pemerintah bagi rumah tangga nelayan miskin dan menganalisis tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial atau dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dilaksanakan di Wilayah Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dan Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu.

##### **3.2.1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Oktober 2022.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1. Jenis Data**

Jenis data dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data ini berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna untuk penelitian ini.

### **3.4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan observasi lapangan, wawancara dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder, wawancara kepada ekonomi rumah tangga nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Serdang Bedagai desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dan desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu dan tidak lupa juga pengambilan data melalui website-website resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI).

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini populasinya adalah nelayan di wilayah pesisir kabupaten serdang bedagai.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah suatu himpunan (subset) dari unit populasi. Design sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability sampling*, pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan cara *Quota Sampling*. *Quota Sampling*, merupakan jenis kedua dari *Purposive Sampling*, metode ini digunakan untuk memastikan bahwa berbagai subgrup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas waktu tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam *quota sampling*, peneliti menentukan target *quota* yang dikehendaki. (Kuncoro, 2013)

Penelitian ini memiliki 50 responden sebagai sampel penelitian. Penggunaan teknik ini digunakan peneliti untuk menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan karakteristik sebagai berikut :

1. Masyarakat serdang bedagai
2. Tinggal di wilayah pesisir
3. Berprofesi sebagai nelayan

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode analisis kuantitatif adalah pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder dimana data dianalisis secara deskriptif kemudian disajikan dengan bantuan diagram atau kurva.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

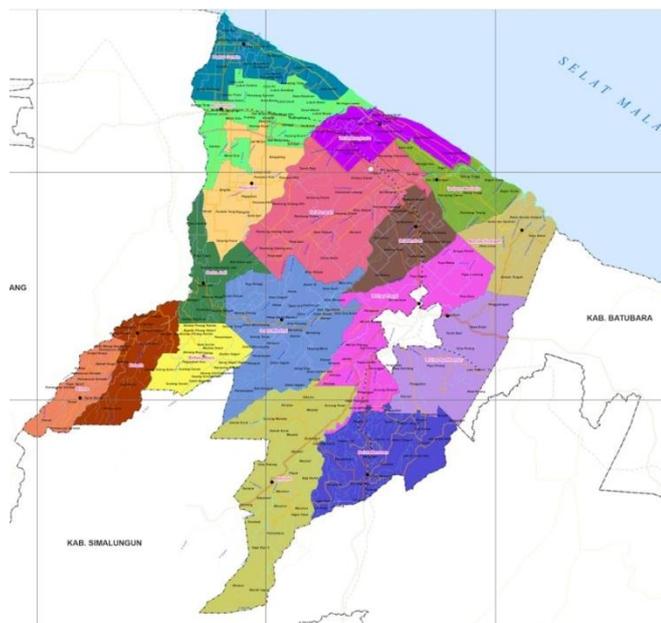
##### **4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai**

###### **A. Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 20 57'' Lintang Utara, 30 16'' Lintang Selatan, 980 33'' - 990 27'' Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :

1. Sebelah Utara : Selat Malaka (190.022 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan, Ibukota Kabupaten Sedang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara dan Simalungun
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
4. Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Serdang Bedagai beriklim tropis dengan kelembapan udara rata-rata 80,75%. Curah hujan per bulan antara 30-343 mm dan periode hujan tertinggi terjadi pada bulan November - Desember. Sementara hari hujan terbesar terjadi pada bulan September - Oktober yang mencapai 28 hari hujan dalam satu bulan. Temperatur udara minimum 24,020C dan maksimum mencapai 32,140C.



**Gambar 4.1** peta kabupaten serdang bedagai

Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah. Bila dilihat dari luas wilayah per Kecamatan berdasarkan jumlah 17 (tujuh belas) kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Dolok Masihul mempunyai proporsi terluas 237.417 Km<sup>2</sup> (12,49 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Serbajadi dengan luas 50.690 Km<sup>2</sup> (2,67 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai). Berikut luas Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dapat di lihat dari tabel di bawah.

**Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai**

| No | Kecamatan     | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Rasio Terhadap Luas Total |
|----|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 1  | Kotarih       | 78,02                   | 4,11                      |
| 2  | Silinda       | 56,74                   | 2,99                      |
| 3  | Bintang Bayu  | 95,59                   | 5,03                      |
| 4  | Dolok Masihul | 237,42                  | 12,49                     |
| 5  | Serbajadi     | 50,69                   | 2,67                      |
| 6  | Sipispis      | 145,26                  | 7,64                      |
| 7  | Dolok Merawan | 120,6                   | 6,35                      |

|    |                   |         |       |
|----|-------------------|---------|-------|
| 8  | Tebing Tinggi     | 182,29  | 9,59  |
| 9  | Tebing Syahbandar | 120,3   | 6,33  |
| 10 | Bandar Khalipah   | 116     | 6,1   |
| 11 | Tanjung Beringin  | 74,17   | 3,9   |
| 12 | Sei Rampah        | 198,9   | 10,47 |
| 13 | Sei Bamban        | 72,26   | 3,8   |
| 14 | Teluk Mengkudu    | 66,95   | 3,52  |
| 15 | Perbaungan        | 111,62  | 5,87  |
| 16 | Pegajahan         | 93,12   | 4,9   |
| 17 | Pantai Cermin     | 80,3    | 4,23  |
|    | Total             | 1900,22 | 100   |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, 2021

Kecamatan terbesar di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Kecamatan Dolok Masihul Luasnya mencapai 237,42 km<sup>2</sup> dan Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Serbajadi luasnya hanya 50,69 km<sup>2</sup>.

## **B. Topografi**

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut (dpl) dengan garis pantai sepanjang 55 km. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 608.691 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,41%.

## **C. Iklim**

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki iklim tropis dengan rata – rata kelembaban udara per bulan sekitar 83 %, curah hujan berkisar 27 sampai dengan 248 mm dan hari hujan berkisar 4 sampai dengan 21 hari per bulan dengan periode tertinggi pada bulan November dan periode hari hujan yang besar pada bulan

September. Penyinaran matahari rata-rata 51 % dengan kecepatan udara rata-rata berkisar 1,8 m/det dengan tingkat penguapan sekitar 3,8 mm/hari. Sedangkan suhu / temperatur udara per bulan minimum 23,70 C dan maksimum 34,20 C.

### C. Demografi

Penduduk adalah semua orang yang berdiam diri di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih 6 bulan dan mereka yang menetap kurang dari 6 bulan dengan tujuan menetap. Penduduk di definisikan menjadi dua yaitu:

1. Orang yang tinggal didaerah tersebut
2. Orang yang secara hukum berhak tinggal didaerah tersebut, dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal disitu, misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di negara lain

Penduduk Serdang Bedagai berjumlah 662 076 jiwa atau 131.844 keluarga dengan kepadatan penduduk rata-rata 313 jiwa per kilometer persegi. Dari jumlah penduduk tersebut, tingkat pengangguran terbuka relatif kecil yakni 14.774 jiwa atau sekitar 3 persen. Sementara keragaman budaya yang ada tergambar dari mukliti etnis yang ada, yakni Melayu 65%, Jawa 13%, Batak Karo 6%, Batak Simalungun 4%, Angkola, Mandailing, Minang, Banjar, Aceh, Nias dan Tionghoa-Indonesia. Berikut adalah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai per kecamatan Tahun 2017:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022**

| No | Kecamatan    | Jumlah Penduduk |        |        |
|----|--------------|-----------------|--------|--------|
|    |              | 2010            | 2020   | 2021   |
| 1  | Kotarih      | 7.975           | 9 169  | 9 267  |
| 2  | Silinda      | 8.332           | 9 514  | 9 609  |
| 3  | Bintang Bayu | 10.581          | 12 511 | 12 679 |

|               |                   |         |         |         |
|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 4             | Dolok Masihul     | 48.241  | 52 705  | 53 005  |
| 5             | Serbajadi         | 19.560  | 21 759  | 21 921  |
| 6             | Sipispis          | 31.617  | 33 826  | 33 949  |
| 7             | Dolok Merawan     | 17.029  | 17 976  | 18 018  |
| 8             | Tebing Tinggi     | 40.253  | 41 162  | 41 132  |
| 9             | Tebing Syahbandar | 32.191  | 33 585  | 33 626  |
| 10            | Bandar Khalipah   | 24.774  | 25 857  | 25 889  |
| 11            | Tanjung Beringin  | 36.864  | 25 857  | 25 889  |
| 12            | Sei Rampah        | 63.379  | 71 366  | 71 982  |
| 13            | Sei Baman         | 42.791  | 46 043  | 46 236  |
| 14            | Teluk Mengkudu    | 41.118  | 48 334  | 48 954  |
| 15            | Perbaungan        | 99.936  | 112 153 | 113 083 |
| 16            | Pegajahan         | 26.859  | 30 206  | 30 463  |
| 17            | Pantai Cermin     | 42.883  | 49 182  | 49 695  |
| <b>Jumlah</b> |                   | 594.383 | 657 490 | 662 076 |

Sumber : Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022

Di lihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Perbaungan memiliki jumlah penduduk paling banyak di bandingkan dari Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Serdang Bedagai, jumlah penduduk di Kecamatan Perbaungan dan pertambahan penduduknya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 99.936 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 112.153 jiwa hingga pada tahun 2021 mencapai 113.083 penduduk. Urutan kedua dengan dan jumlah penduduk paling banyak di tempati oleh kecamatan Sei Rampah. Dimana, pada tahun 2019 jumlah penduduk Sei Rampah mencapai angka 63.379 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 71.366 jiwa hingga pada tahun 2021 meningkat menjadi 71.892. Sedangkan, apabila dilihat dari penduduk paling sedikit, kecamatan Kotarih merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten

Serdang Bedagai. Dimana, pada tahun 2019 jumlah penduduk kecamatan Kotarih hanya sebanyak 7.975 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk hanya 9.267.

Jumlah penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai tersebar di banyak desa. Dimana, berikut ini merupakan data jumlah dan luas desa di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022.

**Tabel 4.3 Luas Desa dengan Jumlah Penduduk Tahun 2022**

| No                     | Kecamatan         | Jumlah Desa | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|--|
| 1                      | Kotarih           | 11          | 78,02                           | 119  |
| 2                      | Silinda           | 9           | 56,74                           | 169  |
| 3                      | Bintang Bayu      | 19          | 95,59                           | 133  |
| 4                      | Dolok Masihul     | 28          | 237,42                          | 223  |
| 5                      | Serbajadi         | 10          | 50,69                           | 432  |
| 6                      | Sipispis          | 20          | 145,26                          | 234  |
| 7                      | Dolok Merawan     | 17          | 120,60                          | 149  |
| 8                      | Tebing Tinggi     | 14          | 182,29                          | 226  |
| 9                      | Tebing Syahbandar | 10          | 120,30                          | 280  |
| 10                     | Bandar Khalipah   | 5           | 116,00                          | 223  |
| 11                     | Tanjung Beringin  | 8           | 74,17                           | 574  |
| 12                     | Sei Rampah        | 17          | 198,90                          | 362  |
| 13                     | Sei Bambi         | 10          | 72,26                           | 640  |
| 14                     | Teluk Mengkudu    | 12          | 66,95                           | 731  |
| 15                     | Perbaungan        | 28          | 11,62                           | 1013                                       |
| 16                     | Pegajahan         | 13          | 93,12                           | 327  |
| 17                     | Pantai Cermin     | 12          | 80,30                           | 619  |
| <b>Serdang Bedagai</b> |                   | 243         | 1 900,22                        | 348  |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, 2022

Dari data di atas terlihat bahwa kecamatan dengan jumlah desa di kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 243 desa dengan luas wilayah sebesar 1.900,22 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 348 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan apabila dilihat dari kecamatan yang memiliki paling banyak desa adalah kecamatan Dolok Masihul dan Kecamatan Perbaungan. Dimana, masing – masing memiliki desa sebanyak 28 desa. Kecamatan Perbaungan memiliki luas wilayah sebesar 11,62 km<sup>2</sup> dengan

kepadatan penduduk 1013 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan Dolok Masihul memiliki luas wilayah sebesar 237,42 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 223 jiwa/km<sup>2</sup>. Artinya, apabila dilihat dari luas wilayah kecamatan Dolok Masihul merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling besar di kabupaten Serdang Bedagai.

## 4.2. Kondisi Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai

### 4.2.1. Indikator Sosial

#### A. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi sosial merupakan keadaan yang berkaitan dengan situasi dalam masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk melihat kondisi sosial suatu daerah, dimana IPM Kabupaten Serdang Bedagai mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, kesehatan, dan hidup layak melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Sehingga berpengaruh pada tingkat kemiskinan di suatu daerah, keberadaan penduduk miskin dalam suatu wilayah tidak akan membawa kemakmuran bagi wilayah tersebut. Sehingga untuk melihat kondisi sosial di Kabupaten Serdang Bedagai melalui grafik indeks pembangunan manusia sebagai berikut.



Sumber : Serdang Bedagai Dalam Angka, 2022

**Gambar 4.2 Perkembangan IPM Kabupaten Serdang Bedagai**

Jika dilihat lebih detail, tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Serdang Bedagai dihasilkan dari peningkatan komponen penyusun IPM. Kenaikan terjadi baik dari nilai angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2016 sebesar 68,71 persen, meningkat 69,10 persen ditahun 2017. Pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia kembali mengalami peningkatan sebesar 69,49 persen, tahun 2019 tumbuh sebesar 69,92 persen dan ditahun 2020 terus mengalami trend peningkatan sebesar 70,29 persen. Selama periode 2016 hingga 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan kemajuan yang besar.

## **B. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah, untuk melihat jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat dari gambar berikut

**Tabel 4.4 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Serdang Bedagai 2015 - 2019**

| Tahun | Garis Kemiskinan<br>(kapita/bulan) | Penduduk Miskin |            |
|-------|------------------------------------|-----------------|------------|
|       |                                    | Jumlah (ribuan) | Persentase |
| 2015  | 301.639                            | 58.30           | 9.59       |
| 2016  | 336.578                            | 57.90           | 9.53       |
| 2017  | 350.892                            | 56.93           | 9.30       |
| 2018  | 361.623                            | 50.49           | 8.22       |
| 2019  | 382.283                            | 48.69           | 7.90       |

Sumber : serdang bedagai dalam angka 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya mengalami penurunan sejak tahun 2015 – 2019. Dimana, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin kabupaten Serdang Bedagai mencapai jumlah 58.30 ribu jiwa, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 57,90 jiwa, pada tahun 2017 turun menjadi 56.93 ribu jiwa hingga pada tahun 2020 turun menjadi 48,69 ribu jiwa.

Apabila dilihat dari angka garis kemiskinan, tren perkembangan garis kemiskinan di kabupaten Serdang Bedagai juga menunjukkan tren yang baik. Dimana, setiap tahun garis kemiskinan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 garis kemiskinan kabupaten Serdang Bedagai sebesar 301.639 kapita/bulan dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 336.578 kapita/bulan, hingga pada tahun 2020 garis kemiskinan naik hingga menjadi sebesar 382.283 kapita/bulan.

### C. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan Serdang Bedagai 2017-2021**

| <b>Fasilitas Kesehatan</b>      | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rumah Sakit                     | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           |
| Rumah Bersalin                  | 5           | 17          | 52          | 542         | -           |
| Puskesmas                       | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| Posyandu                        | 817         | 817         | 817         | 817         | 815         |
| Klinik/Balai Kesehatan/Polindes | 19          | 32          | 8           | 275         | 38          |
| Pusling                         | 20          | 20          | 25          | 25          | 25          |
| Pustu                           | 76          | 77          | 77          | 77          | 77          |

Sumber : dinas kesehatan kabupaten Serdang bedagai

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan di tingkat kecamatan dan pedesaan cukup memadai di Kabupaten Serdang Bedagai. Dimana, Pada tahun 2021 tercatat 6 rumah sakit, 20 puskesmas, 817 posyandu, 45 rumah bersalin dan 275 klinik/ balai kesehatan.

#### 4.2.2. Indikator Ekonomi

##### A. Nilai PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan dan struktur ekonomi suatu daerah dalam suatu kurun waktu.

**Tabel 4.6 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2017 – 2021 (milyar rupiah)**

| Kategori/Lapangan Usaha   | 2021      | 2020      | 2019      | 2018      | 2017      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 11 938.50 | 11 134.01 | 10 650.95 | 10 095.38 | 9 425.28  |
| B. Pertambangan dan Penggalan                                     | 273.41    | 254.31    | 253.24    | 234.52    | 218.52    |
| C. Industri Pengolahan  | 5 784.27  | 5 371.76  | 5 294.07  | 5 072.84  | 4 738.85  |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 24.94     | 23.69     | 22.15     | 19.99     | 18.49     |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 3.85      | 3.84      | 3.70      | 3.48      | 3.32      |
| F. Konstruksi   | 3 169.86  | 2 992.67  | 3 059.91  | 2 750.12  | 2 492.18  |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 4 999.50  | 4 677.82  | 4 539.71  | 4 013.89  | 3 656.73  |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 242.41    | 239.07    | 259.28    | 238.89    | 228.49    |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 763.66    | 765.11    | 833.60    | 770.39    | 721.85    |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 171.63    | 157.18    | 145.29    | 130.96    | 122.20    |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 157.82    | 150.42    | 149.53    | 143.96    | 138.26    |
| L. Real Estate  | 886.35    | 860.32    | 817.91    | 747.10    | 682.62    |
| M,N. Jasa Perusahaan  | 158.76    | 153.76    | 159.03    | 143.21    | 134.73    |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 974.40    | 969.71    | 940.17    | 867.91    | 812.08    |
| P. Jasa Pendidikan  | 418.32    | 401.65    | 387.58    | 356.60    | 331.10    |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 282.19    | 282.23    | 276.94    | 251.72    | 228.84    |
| R,S,T,U. Jasa lainnya   | 168.98    | 164.91    | 166.40    | 153.85    | 141.05    |
| Serdang Bedagai   | 30 418.85 | 28 602.46 | 27 959.44 | 25 994.82 | 24 094.59 |

Sumber : serdang bedagai dalam angka 2022

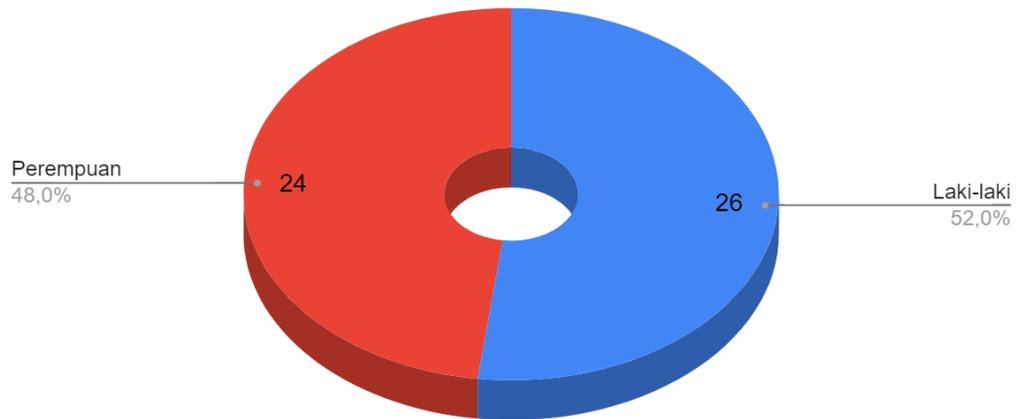
Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2017 PDRB Serdang Bedagai sebesar Rp. 24 094.59 miliar, meningkat menjadi Rp. 25.994.82 miliar pada tahun 2018 dan Rp. 28.602.46 miliar pada tahun 2020 hingga pada tahun 2021 menyentuh angka Rp. 30 418.85 miliar. Peningkatan PDRB Serdang Bedagai setiap tahunnya di dominasi oleh kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Dimana, pada tahun 2020 kontribusinya sebesar Rp. 11.134.01 miliar meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 11.938.50 miliar. Kontribusi urutan kedua di tempati oleh sector industri pengolahan. Dimana, pada tahun 2020 kontribusi sector pengolahan sebesar Rp. 5.371.76 miliar mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp. 5.784.27 miliar. Sedangkan, sector paling minim kontribusi adalah sector pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang. Dimana, pada tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar Rp. 3.84 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.85 miliar.

### **4.3. Evaluasi Program Bantuan Pemerintah Bagi Rumah Tangga Nelayan**

#### **4.3.1. Informasi Umum**

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 50 responden. Dimana, dalam proses pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesiner, peneliti meminta responden untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Adapun identitas responden yang diminta seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pendapatan. Identitas responden dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

### Jenis Kelamin Responden

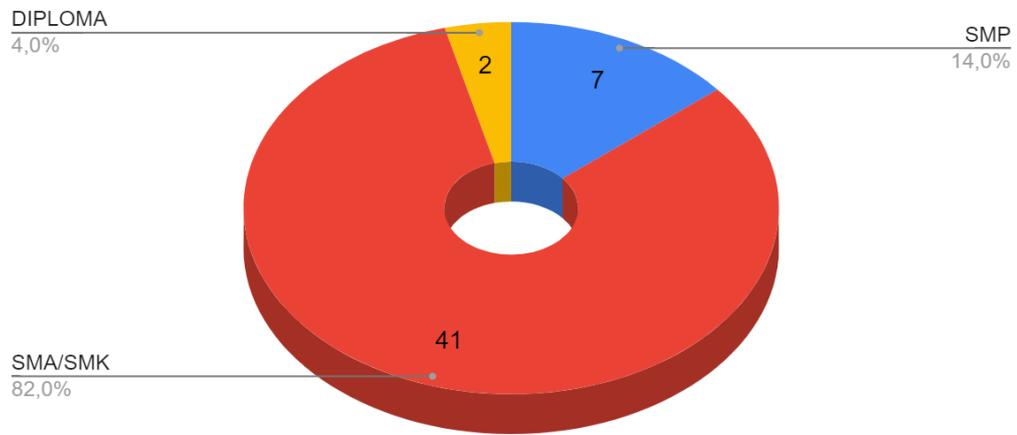


*Sumber : Data primer diolah, 2021*

#### **Gambar 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan gambar diatas, dari survey yang dilakukan terhadap 50 responden terdapat 24 responden berjenis kelamin perempuan dan 26 responden berjenis kelamin laki-laki.

### Tingkat Pendidikan

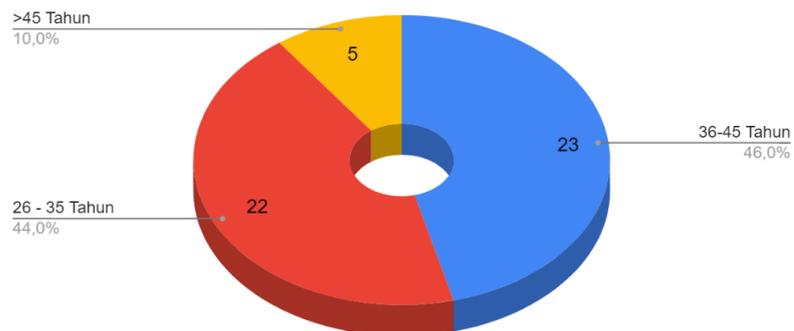


Sumber : Data primer diolah, 2021

### Gambar 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah SMA/SMK, dimana terdapat 41 responden berpendidikan SMA/SMK, 7 responden berpendidikan SMP dan 2 responden berpendidikan DIPLOMA/S1.

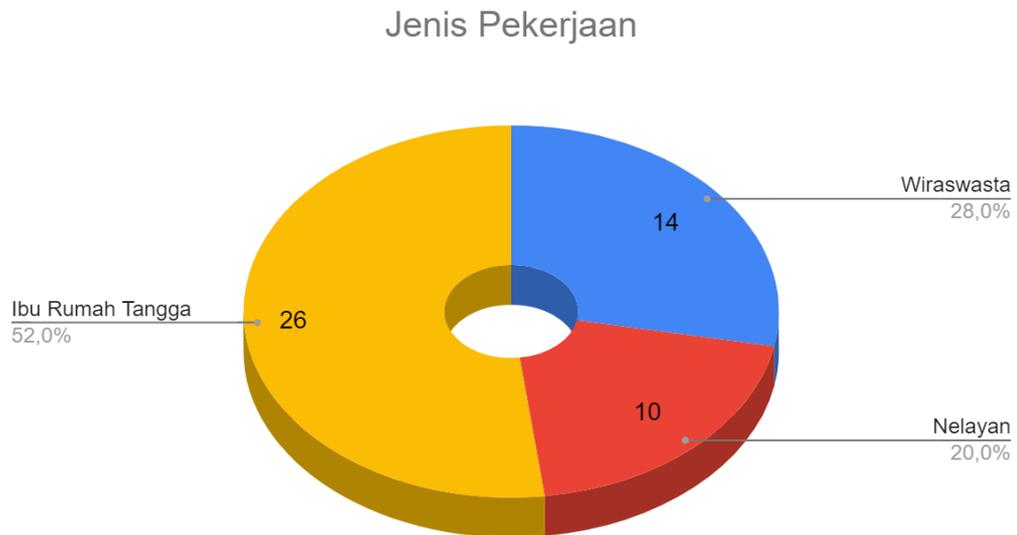
### Usia



Sumber : Data primer diolah, 2021

### Gambar 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Usia

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berusia 36 – 45 Tahun. Dimana, terdapat 23 responden berusia 36-45 Tahun, 22 responden berusia 22 tahun dan 5 responden berusia >45 tahun.

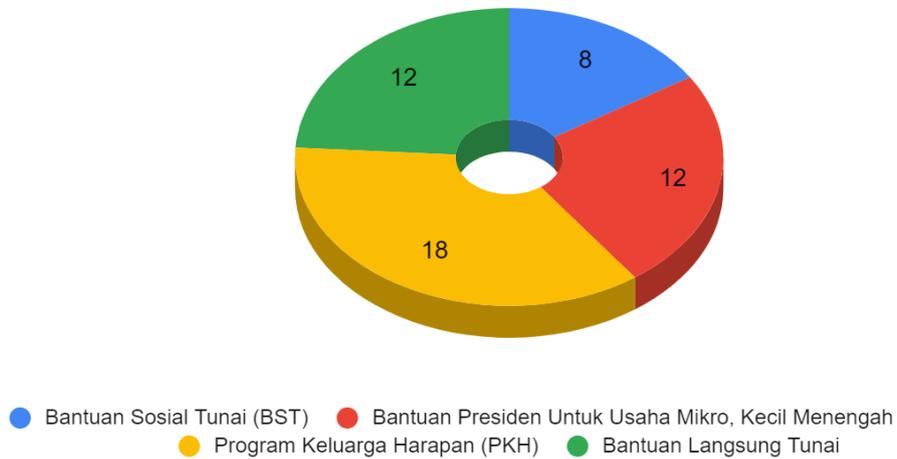


*Sumber : Data primer diolah, 2022*

#### **Gambar 4.6 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa responden memiliki klasifikasi pekerjaan yang berbeda-beda. Dimana, terdapat 26 responden atau 52% dari responden memiliki profesi sebagai Ibu rumah tangga, 10 responden atau 20% dari responden berprofesi sebagai nelayan, 14 responden atau 28% dari responden berprofesi sebagai Wiraswasta.

## Program Bantuan Pemerintah Apa Yang Pernah Kalian Dapatkan

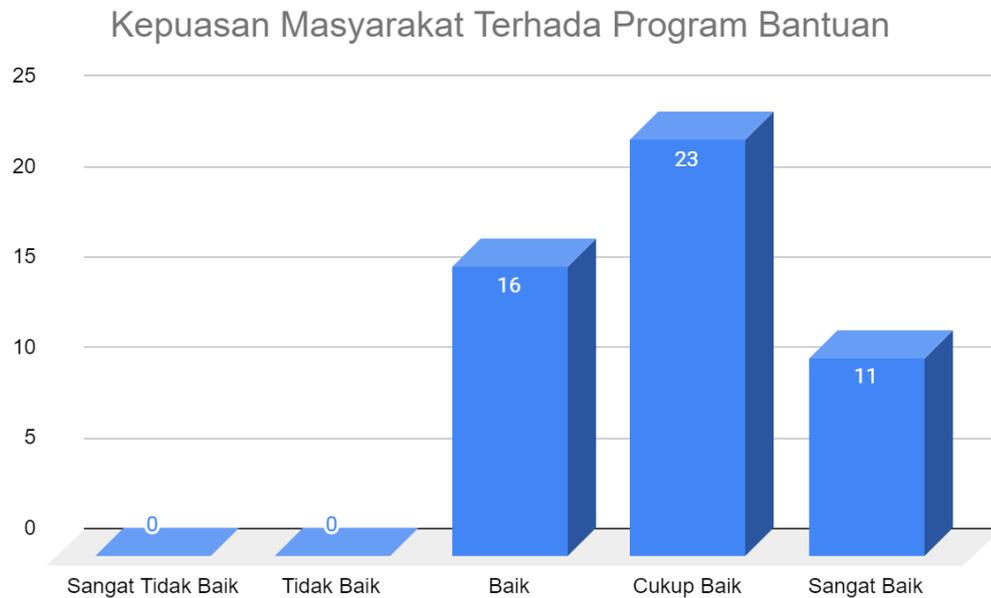


*Sumber : Data primer diolah, 2022*

### **Gambar 4.7 Program Bantuan Pemerintah Yang Didapatkan**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas mendapatkan program bantuan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana, terdapat 18 responden mendapat bantuan program PKH, 12 responden mendapat bantuan langsung tunai dan bantuan presiden untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan 8 responden mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST).

### 4.3.2. Efektivitas Penerima Bantuan



Sumber : Data primer diolah, 2021

**Gambar 4.8 Kepuasan Terhadap Program Bantuan**

Dari data diatas mengenai kepuasan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah terdapat 23 responden menyatakan kepuasannya cukup baik, 11 responden menyatakan sangat baik dan 16 responden menyatakan baik. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa program pemerintah memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merasa puas dikarenakan pada saat masyarakat merasakan kesulitan ekonomi program bantuan pemerintah memberikan pertolongan bagi mereka dalam segi pemenuhan kebutuhan.

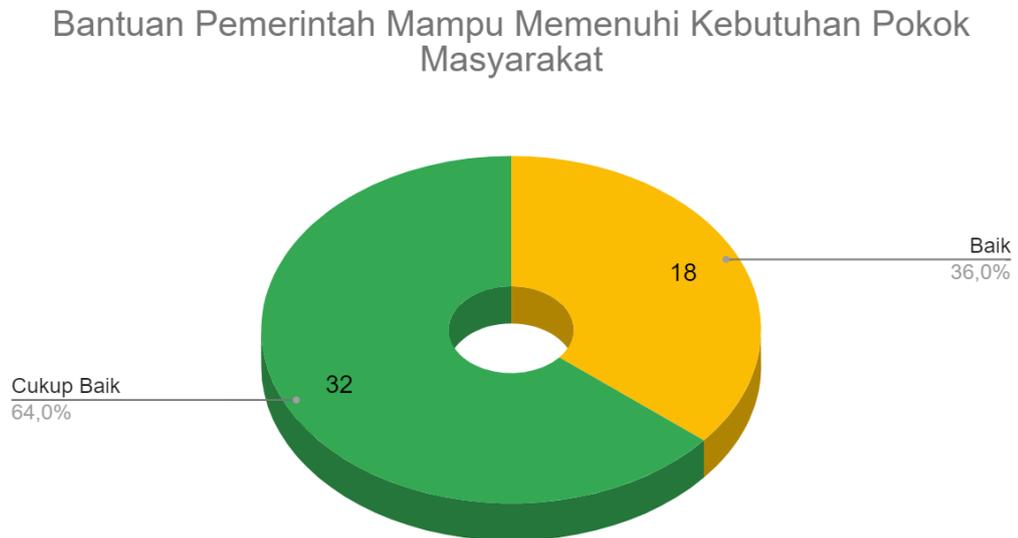


*Sumber : Data primer diolah, 2021*

#### **Gambar 4.9 Program Bantuan Pemerintah Membantu Mengurangi Beban Keluarga**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat menyatakan cukup setuju dengan program bantuan pemerintah sangat membantu mengurangi beban keluarga. Dimana, terdapat 33 responden menyatakan cukup baik, 14 responden menyatakan sangat baik dan 3 responden menyatakan baik. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa meskipun bantuan pemerintah tidak terlalu besar namun dengan adanya program bantuan ini masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk beberapa hari.

### 4.3.3. Efisiensi



Sumber: Data primer diolah, 2021

**Gambar 4.10 Bantuan Pemerintah Mampu Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat**

Dari data diatas mengenai bantuan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mayoritas menjawab cukup baik. Dimana, terdapat 32 atau 64% responden menyatakan cukup baik, 18 atau 36% menyatakan baik. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa alasan mengapa tidak ada yang menjawab sangat baik karena masyarakat beranggapan program bantuan hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek namun tidak menyelesaikan masalah perekonomian.

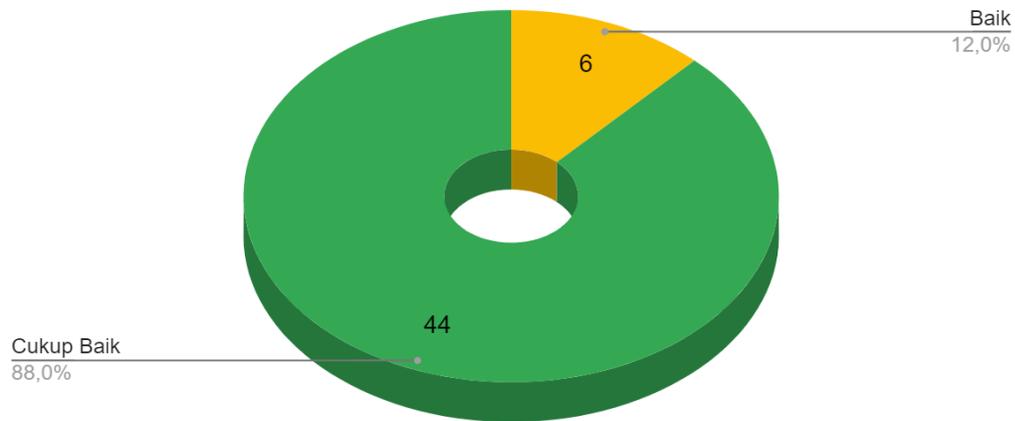


*Sumber: Data primer diolah, 2021*

**Gambar 4.11 Program Bantuan Pemerintah Meringankan Beban Hidup Penerima**

Dari data diatas mengenai program bantuan pemerintah meringankan beban hidup penerima mayoritas masyarakat menjawab cukup baik. Dimana, 36 responden menyatakan cukup baik, 11 responden menjawab sangat baik dan 3 responden menyatakan baik. Artinya, masyarakat menganggap bahwa program bantuan pemerintah dapat meringankan beban keluarga.

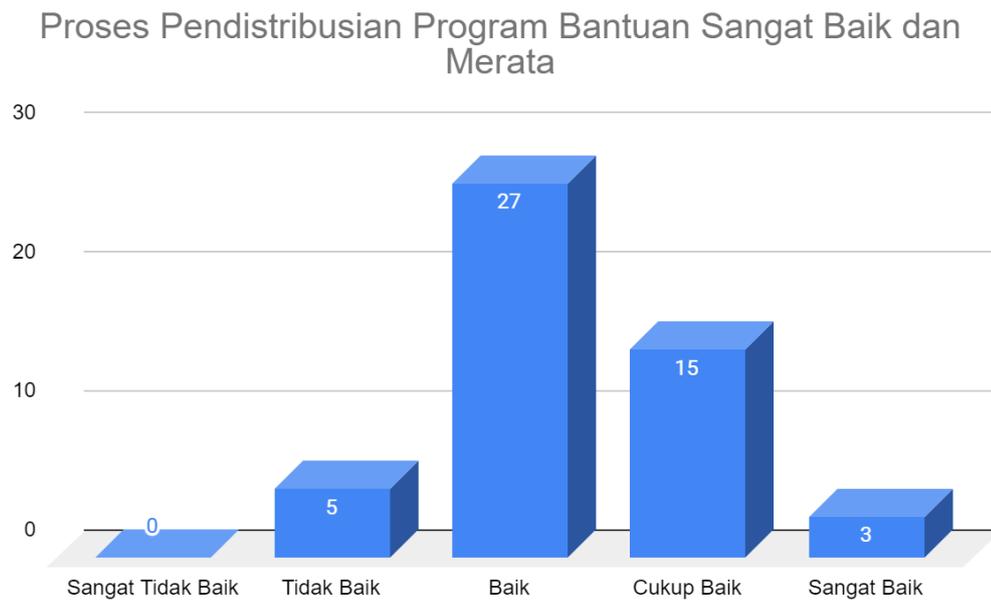
## Penerima Sangat Mengandalkan Program Bantuan Tersebut



*Sumber: Data primer diolah, 2021*

### **Gambar 4.12 Penerima sangat mengandalkan program bantuan tersebut**

Dari data diatas mengenai penerima sangat mengandalkan program bantuan pemerintah mayoritas responden menyatakan cukup baik. Dimana, terdapat 44 atau 88% menyatakan cukup baik dan 6 atau 12% responden menjawab baik. Artinya, masyarakat beranggapan bahwa program bantuan pemerintah merupakan salah satu andalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.



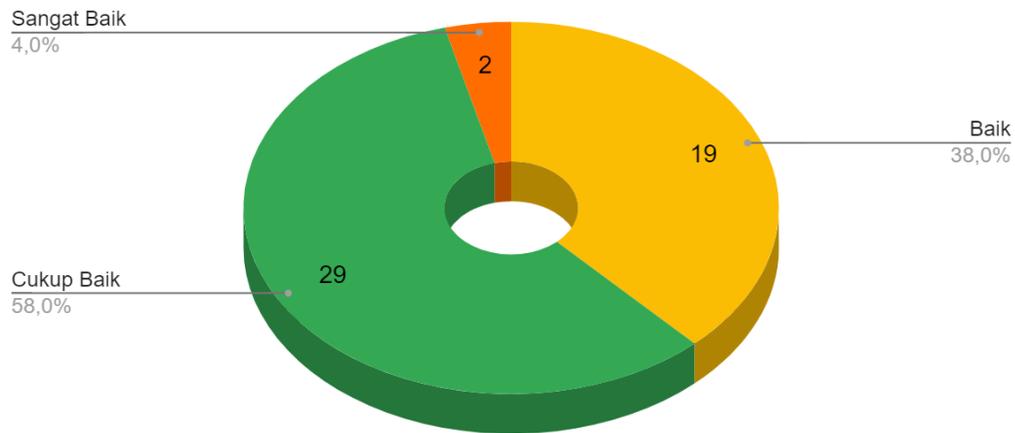
*Sumber: Data primer diolah, 2022*

**Gambar 4.13 Proses Pendistribusian Program Bantuan Sangat Baik dan Merata**

Dari data di atas mengenai proses pendistribusian program bantuan mayoritas masyarakat menjawab baik. Dimana, terdapat 27 responden menjawab baik, 15 responden menyatakan cukup baik, 5 responden menyatakan tidak baik dan 3 responden menyatakan sangat baik. Artinya, meskipun mayoritas masyarakat menyatakan baik namun masih terdapat masyarakat yang merasa bahwa pendistribusian bantuan pemerintah tidak merata. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa masih banyak masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan justru mendapat bantuan pemerintah tersebut.

#### 4.3.4. Pemerataan

##### Proses Penyaluran Bantuan Pemerintah Sudah Tepat Waktu

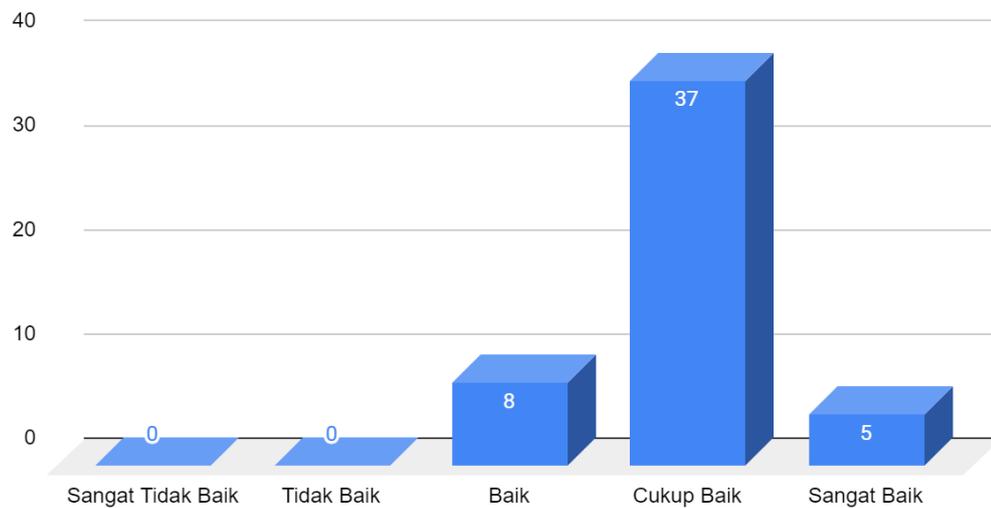


*Sumber: Data primer diolah, 2022*

#### **Gambar 4.14 Program Penyaluran Bantuan Pemerintah Sudah Tepat Waktu**

Dari data di atas mengenai penyaluran bantuan sudah tepat waktu mayoritas masyarakat menjawab sudah cukup baik. Dimana, 29 atau 58% masyarakat menyatakan cukup baik, 19 atau 38% menyatakan baik dan 2 atau 4% menyatakan sangat baik. Peneliti menemukan bahwa masyarakat merasa bahwa bantuan tersebut tepat waktu dikarenakan bantuan diberikan di saat kondisi ekonomi masyarakat kurang baik dan membutuhkan bantuan.

### Masyarakat Mengetahui Informasi Mengenai Program Bantuan Pemerintah



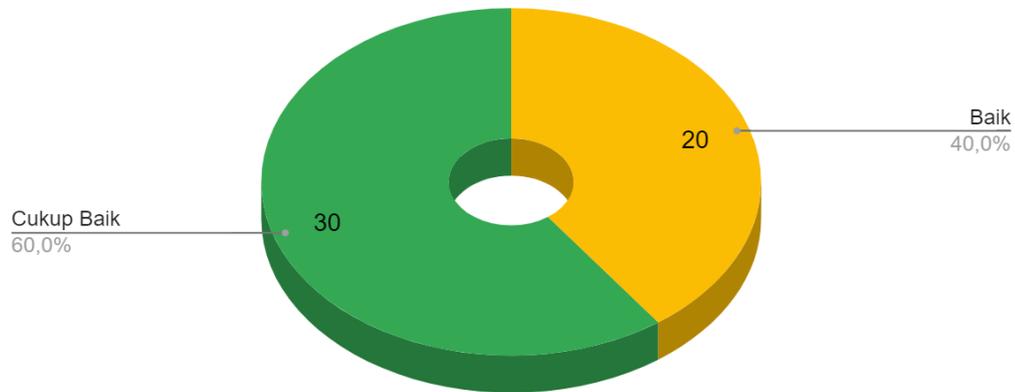
Sumber: Data primer diolah, 2022

#### **Gambar 4.15 Masyarakat mengetahui informasi mengenai program bantuan Pemerintah**

Berdasarkan hasil data di atas mengenai pengetahuan masyarakat tentang bantuan pemerintah, mayoritas masyarakat mengetahui dengan cukup baik. Dimana, terdapat 37 responden menyatakan cukup baik mengetahui, 8 responden menyatakan baik dan 5 responden menyatakan sangat baik. Peneliti menemukan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai adanya program bantuan pemerintah ini berasal dari berbagai sumber seperti perangkat desa yang menyuarakan dan juga adanya informasi berbagai sumber seperti iklan televisi dan berita-berita yang disampaikan sehingga masyarakat mengetahui informasi adanya bantuan pemerintah.

#### 4.3.5. Tanggung Jawab

##### Masyarakat Mengetahui Bagaimana Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

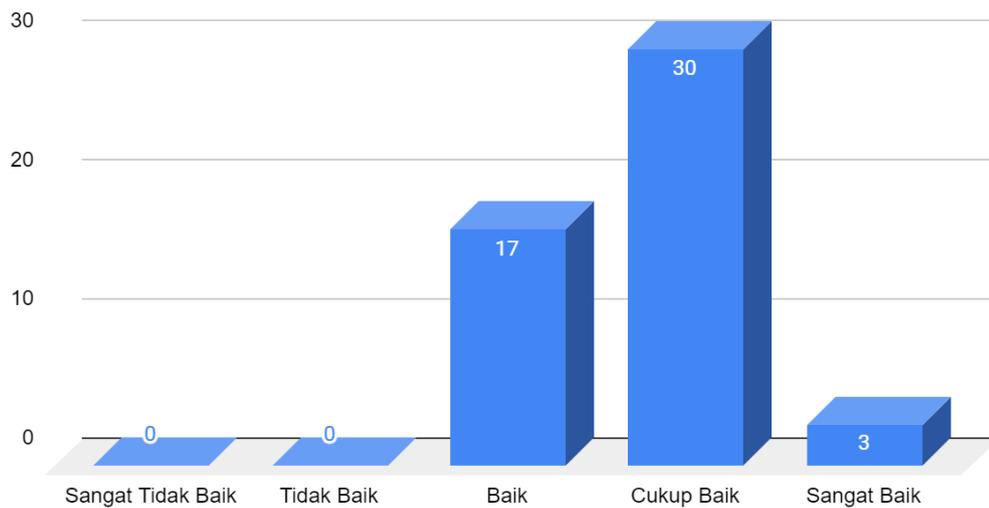


Sumber: Data primer diolah, 2022

#### **Gambar 4.16 Pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan pemerintah**

Berdasarkan data di atas mengenai pemahaman masyarakat tentang kriteria penerima bantuan pemerintah, mayoritas responden menjawab cukup baik. Dimana, 30 atau 60% menyatakan cukup baik dan 20 atau 40% menyatakan baik. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa masyarakat mengetahui bahwa masyarakat mengetahui bahwa kondisi masyarakat yang kurang mampu harus mendapatkan bantuan pemerintah dibandingkan masyarakat mampu.

### Masyarakat Menggunakan Dana Bantuan Tersebut Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-Hari

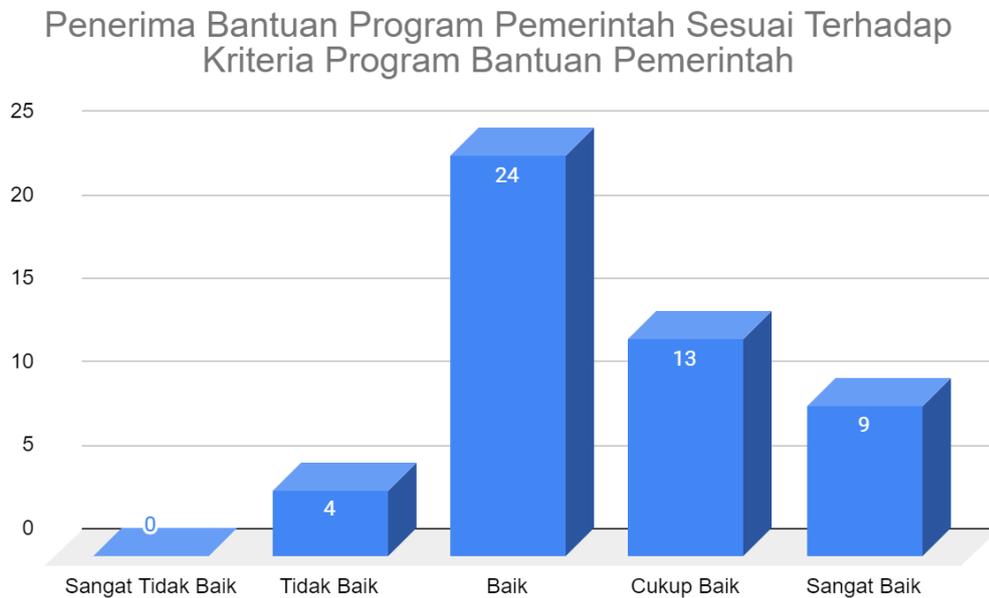


Sumber: Data primer diolah, 2022

#### **Gambar 4.17 Masyarakat menggunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari**

Berdasarkan data di atas mengenai penggunaan dana bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, mayoritas masyarakat menjawab cukup baik. Dimana, terdapat 30 responden menyatakan cukup baik, 17 responden menyatakan baik dan 3 responden menyatakan sangat baik.

#### 4.3.6. Ketepatan



*Sumber: Data primer diolah, 2022*

#### **Gambar 4.18 kesesuaian penerima bantuan terhadap kriteria program bantuan pemerintah**

Berdasarkan data di atas mengenai kesesuaian penerima bantuan terhadap kriteria program bantuan pemerintah, mayoritas menjawab baik. Dimana, terdapat 24 responden menyatakan baik, 13 responden menyatakan cukup baik, 9 responden menyatakan sangat baik dan 4 responden menyatakan tidak baik. Artinya, meskipun mayoritas merasa baik masih ada responden yang menyatakan tidak baik dikarenakan mereka beranggapan bahwa masih terdapat beberapa penerima bantuan yang berasal dari masyarakat mampu dan tidak masuk dalam kategori miskin.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Indikator sosial kabupaten serdang bedagai menunjukkan tren yang baik setiap tahunnya. Dimana, dilihat dari IPM Selama periode 2016 hingga 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan kemajuan yang besar. Dari tren perkembangan garis kemiskinan di kabupaten Serdang Bedagai juga menunjukkan tren yang baik.
2. Indikator ekonomi kabupaten Serdang dilihat perkembangan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan PDRB Serdang Bedagai setiap tahunnya di dominasi oleh kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan.
3. Program bantuan pemerintah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti dari aspek efektifitas, efisiensi. Akan tetapi, pada aspek pemerataan masyarakat masih menganggap bahwa program bantuan pemerintah belum di distribusikan secara merata sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

#### **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek pembangunan ekonomi pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai harus mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam pendistribusian program bantuan pemerintah harusnya lebih melakukan pengecekan mendalam pada penerima bantuan, sehingga distribusi bantuan pemerintah akan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K.D., Erfit & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Volume 7, halaman 1-34.
- Alimul, Hidayat A.A. (2008). *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika
- Ananta, P. (2013). *Determinan Pembangunan Manusia Lampung*. Tesis, FEB Universitas Lampung.
- Azhari, Ainin, and Dwi Suhartini. 2021. "EFEKTIVITAS DANA DESA UNTUK BLT SEBAGAI BENTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DESA BERBEK KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO". *Jurnal Proaksi* 8 (2), 354 -62. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1830>.
- Bailey, J. M., & Pillard, R. C. (1995). Genetics of human sexual orientation. *Annual Review of Sex Research*, 6, 126–150.
- Cahaya, A. (2015). Fishers Community in the Coastal Area: A Note from Indonesian Poor Family. *Procedia Economics and Finance*, 26(15), 29–33. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00801-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00801-1)
- Efrizal, R. (2021). *Dampak COVID-19, Nelayan di Sumsel Jual Ikan dengan Harga Miring*. 2020
- Fernando, Carly Erfly. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad

Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Politico*,  
Vol.9, No 2

Kusuma, Dwi; Setiawina, I Nyoman Djinar; Utama, I Made Suyana.(2018.)  
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Nelayan Di  
Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*,  
7(11). 2437-2466.

Mardhia, D., Kautsari, N., Ilham Syaputra, L., Ramdhani, W., & Okta Rasiardhi,  
C. (2020). Penerapan Protokol Kesehatan dan Dampak Covid-19 terhadap  
Harga Komoditas Perikanan dan Aktivitas Penangkapan. *Indonesian  
Journal of Applied Science and Technology*, 1(2), 80– 87.

Mangkoesebroto. 1993. *Ekonomi Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta : BPFU UGM

Mankiw, N.Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta:Erlangga

Michael.P.Todaro, Stephen C.Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi* Edisi  
kesebelas. Erlangga. Jakarta

Nugroho, M. (2015). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
Pesisir (Pemp) Di Kabupaten Pasuruan. *Teknologi Pangan: Media  
Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*. 6(1)

Pakasi, C.B.D. (2005). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian  
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara*, Pascasarjana, Institut  
Pertanian Bogor, Bogor.

Parenrengi, S., Yunas, S., & Hilmiyah, N. (2020). Sosial Ekonomi dan  
Kesejahteraan Nelayan di Wilayah Teluk Jakarta: Literature Review. *Jurnal  
Riset Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 93–104.

- Qodriyatun, S. N. (2013). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kota Batam Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*. 4(2). 91-100
- Ratri, A. M. (2021). Pandemi COVID-19 dan Nelayan: Menyoal Dampak pada Keberlanjutan Penghidupan. *Masyarakat Dan Budaya*, 11(15), 2020.
- Sadono, Sukirno. 2010. Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Perseda. Jakarta
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty : An Estimation for Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- UNDP. 2004. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York
- Widyastuti, R. A. Y. (2020). Edhy Prabowo: Corona Turunkan Permintaan Ikan Hingga 20 Persen

## KUESIONER

### Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Wilayah Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| <b>Hari / Tanggal :</b> |  |                  |
| <b>Surveyor</b>         |  |                  |
| <b>No Kuesioner</b>     |  |                  |
| <b>I. Data Pribadi</b>  |  |                  |
| Nama                    |  |                  |
| Alamat                  |  |                  |
| Jenis Kelamin           | 1)Laki-Laki      2) Perempuan  |                  |
| Pendidikan Terakhir     | 1)SD 2) SMP 3) SMA/SMK 4) DIPLOMA 5)S1 6) Lainnya<br>.....                                       |                  |
| Usia                    | 1) 17 – 25 Tahun   | 2) 36 – 45 Tahun |
|                         | 3) 26 – 35 Tahun   | 4) >45 Tahun     |
| Status Pekerjaan        | 1) Pelajar/Mahasiswa 2) Wiraswasta<br>Lainnya, Sebutkan.....                                     |                  |
| Penghasilan             | 1) Rp. 1 Juta – 2 Juta<br>2) Rp. 2,1 Juta – 3 Juta<br>3) Rp. 3,1 Juta – 4 Juta<br>4) Rp > 4 Juta |                  |

## II. Persepsi tentang belanja online

1. Apakah saudara pernah menerima program bantuan pemerintah?
  - A. Pernah
  - B. Tidak Pernah
2. Program bantuan pemerintah apa yang pernah kalian dapat ?
  - A. Bantuan Sosial Tunai (BST)
  - B. Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro, Kecil Menengah
  - C. Program Keluarga Harapan (PKH)
  - D. Bantuan Langsung Tunai
  - E. Lainnya, sebutkan.....

3. Berapa Jumlah dana yang anda dapat melalui program bantuan pemerintah ?
- A. 1 Jt – 2 jt
  - F. Rp. 2,1 jt – Rp3 jt
  - G. Rp. 3,1 – Rp 4 jt
  - H. > 5 jt

### III. Pertanyaan Khusus

Petunjuk Pengisian :

Isilah jawaban sesuai pendapat anda dengan berikan tingkat penilaian dengan checklist (√) pada kolom yang tersedia.

Jawaban yang tersedia berupa skala likert, yaitu antara 1-5 yang mempunyai arti :

5 = Sangat Baik 4 = Cukup Baik 3 = Baik 2 = Tidak Baik 1= Sangat Tidak Baik

| No.                | PERTANYAAN  |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Efektivitas</b> |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.                 | Masyarakat merasa puas terhadap program bantuan yang telah di berikan oleh pemerintah |   |   |   |   |   |
| 2.                 | Program bantuan pemerintah sangat membantu dalam mengurangi beban keluarga            |   |   |   |   |   |
| 3.                 | Pencapaian hasil dari pelaksanaan bantuan pemerintah sudah maksimal                   |   |   |   |   |   |
| <b>Efisiensi</b>   |   |   |   |   |   |   |
| 1.                 | Bantuan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat                          |   |   |   |   |   |
| 2                  | Program bantuan pemerintah mampu meringankan beban hidup penerima                     |   |   |   |   |   |
| 3                  | Penerima bantuan pemerintah sangat mengandalkan program bantuan tersebut              |   |   |   |   |   |
| 4.                 | Proses pendistribusian program bantuan sangat baik dan merata                         |   |   |   |   |   |
| <b>Perataan</b>    |   |   |   |   |   |   |

|                        |   |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 1.                     | Program bantuan pemerintah di alokasikan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan   |  |  |  |  |  |
| 2.                     | Proses penyaluran bantuan pemerintah sudah tepat waktu                                      |  |  |  |  |  |
| 3.                     | Masyarakat mengetahui informasi mengenai program bantuan pemerintah                         |  |  |  |  |  |
| <b>Responsibilitas</b> |   |  |  |  |  |  |
| 1                      | Masyarakat penerima bantuan pemerintah paham terhadap program bantuan pemerintah            |  |  |  |  |  |
| 2                      | Masyarakat mengetahui bagaimana kriteria penerima bantuan pemerintah                        |  |  |  |  |  |
| 3                      | Masyarakat menggunakan dana bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari           |  |  |  |  |  |
| <b>Ketepatan</b>       |   |  |  |  |  |  |
| 1                      | Penerima bantuan program pemerintah sesuai terhadap kriteria program bantuan pemerintah     |  |  |  |  |  |
| 2                      | Penerimaan program bantuan pemerintah tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima bantuan |  |  |  |  |  |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2192/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/9/2/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 9/2/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dimas Adjie Priambudi  
NPM : 1805180002  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Mengevaluasi nilai tukar nelayan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Brandan Barat

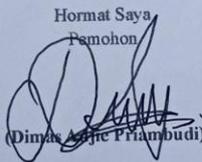
Rencana Judul

1. Evaluasi Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Brandan Barat
2. Perkembangan Ekspor Impor Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pasca Reformasi Ekonomi Indonesia
3. Pengaruh Penghasilan Melalui Media Sosial Terhadap Minat Bekerja Pada Usia Muda Di Indonesia

Objek/Lokasi Penelitian : Wilayah Pesisir Kecamatan Brandan Barat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(Dimas Adjie Priambudi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2192/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/9/2/2022

Nama Mahasiswa : Dimas Adjie Priambudi  
NPM : 1805180002  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tanggal Pengajuan Judul : 9/2/2022  
Nama Dosen Pembimbing : Lailan Safna

Judul Disetujui

~~Evaluasi kemampuan pemerintah~~  
Evaluasi kemampuan Program bantuan  
Pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan  
ekonomi nelayan di wilayah pesisir  
Kabupaten Serdang Bedagai

Medan, .....

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Dosen Pembimbing

Keterangan:

\*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Dasi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567, Kode Pos Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA MAHASISWA : DIMAS ADJIE PRIAMBUDI  
NPM : 1805180002  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
KONSENTRASI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
JUDUL PROPOSAL : EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

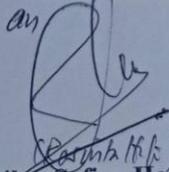
| TANGGAL   | MATERI BIMBINGAN   | PARAF | KETERANGAN |
|-----------|--|-------|------------|
| 21/7-2022 | Revisi Bab I<br>- Tambah data<br>- Ind. kasus<br>- Identifikasi masalah<br>- Rumus & tips → Ajak                         |       |            |
| 27/7-2022 | Bab II<br>→ Grad theory + pendapat orang<br>- tips perhitungan ekonomi<br>- bentuk kebijakan & kbb<br>- terpa konseptual |       |            |
| 3/8-2022  | Revisi bab I & Bab II  |       |            |
| 3/8-2022  | Bab III →<br>- sumber data<br>- Analisis data diskriptif<br>- Questioner<br>- Daftar pustaka, daftar isi<br>- lampiran   |       |            |
| 4/8-2022  | Acc ute seminar proposal   |       |            |

Medan, .....2022

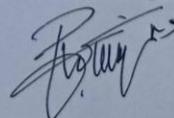
Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Ekonomi  
Pembangunan

Pembimbing

  
(Pembimbing)

Dra. Lailan Safina Hasibuan, M,si



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Pada hari ini Sabtu, 13 Agustus 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

**N a m a** : Dimas Adjie Priambudi  
**N .P.M.** : 1805180002  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Perbaungan, 23 September 2000  
**Alamat Rumah** : Jalan Teratai LK. Juani No. 20 Perbaungan  
**JudulProposal** :Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai

Disetujui / tidak disetujui \*)

| Item       | Komentar  |
|------------|---|
| Judul      | Evaluasi kebijakan <del>kegiatan</del> bantuan pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai |
| Bab I      | rumusan masalah lebih diperjelas, dan manfaat penelitian  |
| Bab II     | Teori Pembangunan Ekonomi, <del>Penyimpulan</del> <sup>Nasional</sup>   |
| Bab III    | teknik pengumpulan data dan teknik Analisis data  |
| Lainnya    | .....   |
| Kesimpulan | <input checked="" type="checkbox"/> Lulus<br><input type="checkbox"/> Tidak Lulus   |

Medan, Sabtu, 13 Agustus 2022

**TIM SEMINAR**

**Ketua**  
  
 Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.  
**Pembimbing**

Dra.Hj. Lailan Safina Hasibuan. M.Si

**Sekretaris**  
  
 Dra.Hj. Roswita Hafni, M.Si.

**Pembanding**  
  
 Dr.Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, 13 Agustus 2022** menerangkan bahwa:

Nama : Dimas Adjie Priambudi  
N.P.M. : 1805180002  
Tempat / Tgl.Lahir : Perbaungan, 23 September 2000  
Alamat Rumah : Jalan Teratai LK. Juani No. 20 Perbaungan  
JudulProposal : Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : **Dra.Hj. Lailan Safina Hasibuan. M.Si**

Medan, Sabtu, 13 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj. Lailan Safina Hasibuan. M.Si

Pembanding

Dr.Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Diketahui / Disetujui  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : DIMAS ADJIE PRIAMBUDI  
NPM : 1805180002  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : JALAN TERATAI NO 20 PERBAUNGAN  
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERDANG BEDAGAI

| Tanggal    | Deskripsi Bimbingan Skripsi  | Paraf | Keterangan |
|------------|--|-------|------------|
| 09/09/2022 | - Perbaiki koreksi <sup>2</sup> yg ada.<br>Untuk deskripsi data, masukkan<br>senyawa ambon.<br>- Perbaiki penulisan judul tabel & gambar | } Lu  |            |
| 19/09/2022 | - lebih diperdalam analisis bab 4<br>- setiap tabel harus dianalisis dg jelas<br>- Perbaiki koreksi yg ada.                              |       | } Lu       |
| 27/09/2022 | - Buat abstrak<br>- buat daftar tabel dan gambar<br>- Rapikan penulisan  | } Lu  |            |
| 07/10/2022 | Sudah selesai diperbaiki dan<br>siap untuk ujian skripsi.  |       | } Lu       |
|            |  |       |            |
|            |  |       |            |
|            |  |       |            |

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. Lailan Syafina, M. Si

Medan, Oktober 2022  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksistensi yang terus menerus diwujudkan  
melalui prestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[f umsumedan](#)

[i umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2999 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2022**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

**Program Studi** : **Ekonomi Pembangunan**  
**Pada Tanggal** : **10/4/2022**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

**Nama** : **Dimas Adjie Priambudi**  
**N P M** : **1805180002**  
**Semester** : **IX (Sembilan)**  
**Program Studi** : **Ekonomi Pembangunan**  
**Judul Proposal / Skripsi** : **Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai**

**Dosen Pembimbing** : **Dra.Hj.Lailan Syafina, M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 04 Oktober 2023**
4. Revisi Judul.....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 08 Rabiul Awwal 1444 H  
04 Oktober 2022 M



Dekan

**H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.**  
**NIDN : 0109086502**

**Tembusan :**

1. Pertinggal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Dimas Adjie Priambudi  
NPM : 1805180002  
Tempat dan Tanggal Lahir : Perbaungan, 23 September 2000  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : Pertama dari 3 (tiga) bersaudara  
Alamat : Jalan Teratai no 20 perbaungan  
No. Telepon : 083162718316  
Email : dimasadjiepriambudi09@gmail.com

### 2. DATA ORANG TUA

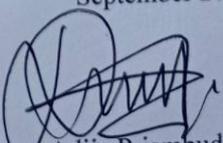
Nama Ayah : Agus Sutrisno  
Nama Ibu : Saridewi  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Teratai no 20 Perbaungan

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2005-2011 : SDN 101929
2. Tahun 2011-2014 : SMP N 1 Perbaungan
3. Tahun 2014-2017 : SMA N 1 Perbaungan

Tahun 2018, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1) Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Medan, September 2022

  
Dimas Adjie Priambudi